



**DISKAN
KOTA DUMAI**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**


DINAS PERIKANAN


PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026



 diskan.dumaikota.go.id

 [dinasperikanan.kotadumai](https://www.instagram.com/dinasperikanan.kotadumai)

 0765-4300498

 JL. Dermaga No.08 Purnama, Dumai

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021-2026 ini dapat disusun, yang merupakan dokumen perencanaan dalam rangka tugas pokok institusi sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan sistematika sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005. Semua program dan kegiatan yang tersusun di dalam Perubahan Rencana Strategis ini sedapat mungkin telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis disusun sebagai pedoman dalam rangka mencapai Visi dan Misi SKPD, perumusan program dan kegiatan (strategis, prioritas dan arah kebijakan) selama periode 5 (lima) tahun, selanjutnya Perubahan Renstra menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Tahunan yang dievaluasi melalui Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP).

Disadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen ini, untuk itu saran-saran penyempurnaan sangat diharapkan. Dokumen ini di buat untuk dapat di jadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi institusi penerima mandat, dimana proses penyusunannya telah diupayakan memenuhi sistem dan mekanisme sebagaimana ditetapkan.

Dumai,

2024



H. APRILAGAN, S.H, M.Si
NIP. 19720-12 200112 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	32
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi	41
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	49
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	53
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	55
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	55
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
5.1 Strategi Dinas Perikanan Kota Dumai	57
5.2 Arah Kebijakan Dinas Perikanan Kota Dumai	59
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	61
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	74
BAB VIII PENUTUP	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kota Dumai	13
2. Diagram Analisi SWOT Perumusan Strategi Jangka Menengah ...	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. PNS Dinas Perikanan Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2023	18
2. PNS Dinas Perikanan Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2003	18
3. PNS Dinas Perikanan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2023	19
4. Personalia Dinas Perikanan Kota Dumai yang Menduduki Jabatan Struktural	19
5. Susunan Personalia Kelompok Jabatan Fungsional	20
6. T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2017-2021	23
7. T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2017-2020	24
8. T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021	28
9. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	30
10. Kaitan Misi, Tujuan, Sasaran Kota Dumai dengan Peran Dinas Perikanan Kota Dumai	36
11. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada Dinas Perikanan Kota Dumai.....	38
12. Telaahan Rencana Strategis K/L, Provinsi dan Kota	45
13. Indikasi Program Kota Dumai	50
14. Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Perikanan Kota Dumai Berdasarkan Sasaran RTRW	51
15. Capaian TPB Dinas Perikanan	52
16. T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	56
17. Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Perikanan Kota Dumai.....	59
18. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	60

19. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai.....	61
20. T-C.27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perikanan Kota Dumai.....	66
21. Rumus Perhitungan Indikator Kinerja	74
22. Target Capaian Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021-2026 .	77
23. T-C.28 Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	77

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif, mengorganisasir secara sistematis usaha-usaha dalam melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap perangkat daerah harus menyusun rencana strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026. Rencana Strategis sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, menjelaskan rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tuntutan masyarakat yang semakin berkembang, menjadikan pemerintah sebagai penerima amanah ataupun mandat perlu mengantisipasinya sejak awal dengan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berazaskan kepada pelayanan masyarakat yang prima. Hal tersebut dilaksanakan melalui berbagai tahap yaitu dengan mengukur perencanaan secara optimal yang disertai dengan pemantauan, pengendalian serta evaluasi secara efektif dan efisien. Guna keperluan ini dibutuhkan suatu Perencanaan Strategik sebagai instrumen mencapai apa yang telah digariskan.

Rencana strategis berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Rencana strategis juga dapat mengawal kebijakan mensejahterakan masyarakat dapat dilaksanakan secara berurutan dan bersinergi dengan perangkat daerah lain yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Rencana strategis perangkat daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal rencana strategis perangkat daerah, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana strategis perangkat daerah.

Hubungan rencana strategis Dinas Perikanan Kota Dumai dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan secara vertikal rencana strategis Dinas Perikanan Kota Dumai disusun berpedoman pada RPJMD Kota Dumai, RPJM bidang Kelautan dan Perikanan dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kemudian secara horizontal rencana strategis Dinas Perikanan Kota Dumai berperan sangat penting dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan perangkat daerah.

Dinas Perikanan Kota Dumai merupakan perangkat daerah Kota Dumai yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Dumai. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada tanggal 23 Juni

2023, maka Dinas Perikanan Kota Dumai melakukan perubahan rencana strategis terhadap kinerja, indikator dan satuan target sub kegiatan dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

- dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Sei E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Sei E)
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri D).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana strategis Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan yang menggambarkan visi, misi, strategi atau arah kebijakan serta program dan kegiatan strategis yang akan dicapai. Adapun maksud penyusunan rencana strategis Dinas Perikanan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis Dinas Perikanan Kota Dumai (5 tahun).
2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan perangkat daerah, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja 5 (lima) tahun lalu menjadi rencana strategis perangkat daerah.
3. Meningkatkan komunikasi baik vertical maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi yang diinginkan.
4. Meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat karena pola pelayanan yang diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perikanan Kota Dumai dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2021-2026.
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai untuk periode tahun 2021-2026.
3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi pemerintah Kota.
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Perikanan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana strategis perangkat daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra perangkat daerah, fungsi Renstra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra perangkat daerah, keterkaitan Renstra. perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra Kementrian/Lembaga, dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang,Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan pembangunan sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi pada tahun mendatang.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat daerah.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala perangkat daerah.

2.2 Sumber Daya Perangkat daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target pada 4 (empat) tahun sebelumnya, menurut Standar pelayanan Minimal (SPM), dan/atau indikator kinerja pelayanan perangkat daerah dan/atau indikator lainnya atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian /Lembaga (K/L) dan Renstra provinsi, hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan

besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian /Lembaga (K/L) ataupun Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan perangkat daerah
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra perangkat daerah pada tahun rencana.

Bab IV Tujuan, dan sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang disajikan dalam tabel.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana program dan kegiatan serta pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam tabel.

Bab VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam

lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel.

Bab VIII Penutup

Pada bagian ini menjelaskan kebijakan yang akan dilakukan pada masa transisi kepemimpinan kepala daerah terpilih yang baru untuk jangka waktu 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat daerah

Dinas Perikanan Kota Dumai mengemban amanah dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan untuk mensejahterakan masyarakat perikanan. Untuk itu disusunlah tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai.

Dinas Perikanan Kota Dumai mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang perikanan. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas perikanan menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perikanan
3. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Dinas Perikanan terdiri dari: (1) Kepala Dinas, (2) Sekretariat, terdiri dari subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional, (3) Bidang Pembudidayaan Ikan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional, (4) Bidang Kenelayanan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional, dan (5) UPT. Adapun bagan susunan organisasi dinas, dapat dilihat pada Gambar 1. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perikanan, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional.

2.1.1 Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas melaksanakan perencanaan umum, pemrograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana,

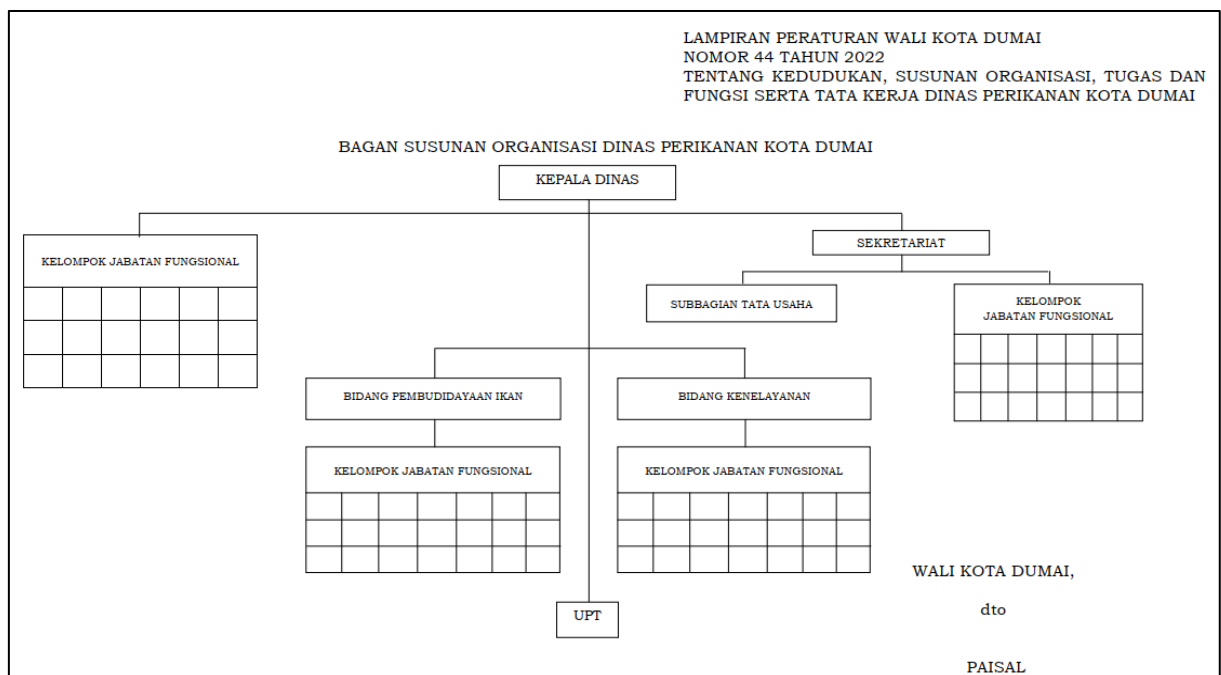
koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretaris membawahi subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Adapun uraian tugas sekretariat adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana strategis organisasi.
2. Pelaksanaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, arsip, kepegawaian, kerumahtanggaan, keuangan dan asset dinas.
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi/Lembaga lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
5. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja pemerintah daerah, perjanjian kinerja, rencana program dan kegiatan serta penganggaran Dinas.
2. Penyelenggaraan urusan administrasi yang meliputi ketatausahaan, arsip, kepegawaian, kerumahtanggaan, keuangan dan aset dinas.
3. Penataan organisasi dan tata laksana.
4. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.
5. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan dinas.
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa.
7. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas.
8. Pengkoordinasian pengumpulan dan pengolahan data di lingkungan Dinas.
9. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur.

10. Pengkoordinasian persiapan bahan untuk rapat-rapat koordinasi perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis.
11. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi/lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
12. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan dinas; dan
13. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.



Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kota Dumai
Sumber: Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 44 Tahun 2022

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi. Adapun uraian tugas subbagian tata usaha adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan penyusunan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian tata usaha.
2. Penyelenggaraan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas.
3. Pelaksanaan fasilitasi administrasi kepegawaian.
4. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.
5. Penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas.

6. Pengumpulkan bahan dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tata usaha dan kepegawaian.
7. Menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional.
8. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan.
9. Menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol.
10. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
11. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.1.2 Bidang Pembudidayaan Ikan

Sebagai perangkat daerah dengan tipe C, Dinas Perikanan didukung oleh 2 (dua) bidang dalam menjalankan tugas dan fungsi dibidang perikanan, yaitu bidang pembudidayaan ikan dan bidang kenelayanan. Bidang Pembudidayaan Ikan dan bidang Kenelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang pembudidayaan ikan mempunyai tugas pelaksanaan perumusan dan kebijakan, pelayanan, pembinaan, standarisasi teknis dan pengembangan usaha dibidang pembudidayaan ikan. Adapun uraian tugas bidang pembudidayaan ikan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pembudidayaan ikan
2. Melakukan analisis perumusan pengembangan kegiatan di bidang pembudidayaan ikan
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kirteria perikanan budidaya
4. Melakukan koordinasi, rekomendasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepala kepala Dinas Perikanan; dan

5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang pembudidayaan ikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. menyiapkan perumusan kebijakan serta merencanakan program/kegiatan dan penganggaran
2. Memfasilitasi penumbuhan/pembentukan dan melaksanakan pembinaan serta pendampingan kelompok pembudidaya ikan
3. Memfasilitasi penerbitan perizinan perikanan budidaya
4. Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data dan informasi
5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penyebarluasan teknologi dan informasi perikanan budidaya
6. Memfasilitasi kemitraan dengan pihak atau lembaga lainnya untuk pengembangan usaha budidaya perikanan
7. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
8. Melaksanakan survey, pendataan dan inventarisasi kawasan potensi serta menyusun rencana perluasan dan revitalisasi kawasan budidaya perikanan darat, payau dan laut
9. Melaksanakan penerapan teknologi usaha budidaya perikanan
10. Melaksanakan pengujian kualitas air di lingkungan budidaya perikanan secara berkala
11. Melaksanakan pemantauan, pencegahan dan penanggulangan organisme pengganggu, hama dan penyakit ikan
12. Melaksanakan pemantauan obat ikan, kimia dan bahan biologi (oikb) yang beredar
13. Memfasilitasi proses standarisasi dan sertifikasi usaha budidaya
14. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian residu dan bahan pencemar lainnya
15. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan perikanan budidaya

16. Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada bidang pembudidayaan ikan; dan
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dan tugas fungsinya.

2.1.3 Bidang Pembudidayaan Ikan

Bidang Kenelayanan mempunyai tugas pelaksanaan perumusan dan kebijakan, pelayanan, pembinaan, standarisasi teknis dan pengembangan usaha di bidang kenelayanan. Uraian tugas bidang kenelayanan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan rencana kebijakan dibidang kenelayanan
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kenelayanan dalam pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha dan kemitraan, dan pembinaan kelembagaan
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, petunjuk teknis dan kriteria dibidang kenelayanan meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha dan kemitraan, dan pembinaan kelembagaan
4. Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kenelayanan meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha dan kemitraan, dan pembinaan kelembagaan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugasnyanya, bidang kenelayanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun dan menyiapkan perumusan kebijakan serta merencanakan program/kegiatan dan penganggaran
2. Melakukan analisa peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan bidang kenelayanan
3. Memfasilitasi penumbuhan/pembentukan dan melaksanakan pembinaan serta pendampingan kelompok nelayan dan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan

4. Melakukan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pendampingan kepada kelompok nelayan dan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan
5. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data jumlah ikan keluar masuk antar wilayah, data konsumsi ikan, data usaha dan investasi pada kegiatan pemasaran hasil kelautan dan perikanan
6. Memfasilitasi kemitraan sarana produksi antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan swasta
7. Memfasilitasi kemitraan permodalan antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan perbankan dan non perbankan
8. Melakukan pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, pembinaan kelayakan dasar di unit pengolahan ikan skala kecil dan menengah
9. Menganalisis kebutuhan perlindungan keselamatan nelayan
10. Menganalisis diversifikasi usaha keluarga nelayan
11. Melakukan pembinaan dan pendampingan izin usaha perikanan
12. Melaksanakan identifikasi pada perairan umum dalam pengelolaan sumberdaya perairan
13. Mengumpulkan data dan informasi tentang izin usaha perikanan
14. Melakukan pengawasan usaha perikanan
15. Melakukan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang kenelayanan
16. Melakukan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada bidang kenelayanan; dan
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dan tugas fungsinya.

2.1.4 Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Ada 2 (dua) UPT dibawah Dinas Perikanan, yaitu UPT Benih Ikan Air Tawar Kelas A dan UPT Budidaya Air Payau Kelas A. Kepala UPT bertugas melaksanakan kegiatan teknis

operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan melaksanakan kegiatan teknis penunjang untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

2.1.5 Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional pada lingkungan Dinas Perikanan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas pimpinan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

2.2 Sumber Daya Perangkat daerah

2.2.1 Sumber Daya Aparatur Dinas Perikanan Kota Dumai

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perikanan Kota Dumai didukung dengan 17 Orang Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari golongan IV, golongan III, dan golongan II dengan perincian sebagai berikut (Tabel 1).

Tabel 1. PNS Dinas Perikanan Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2023

No	Golongan Ruang	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Golongan IV	3	18
2	Golongan III	13	76
3	Golongan II	1	6
Jumlah		17	100

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Dinas Perikanan di dominasi oleh golongan III sejumlah 13 orang. Berdasarkan jabatan dan eselon, Dinas Perikanan Kota Dumai terbagi menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu eselon II, eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan staf. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. PNS Dinas Perikanan Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2023

No	Golongan Ruang	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Eselon II	1	6
2	Eselon III	3	18
3	Eselon IV	5	29
4	Pejabat Fungsional	5	29

No	Golongan Ruang	Jumlah (orang)	Persentase (%)
5	Staf/Non Struktural	3	18
Jumlah		17	100

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Tingkatan pendidikan pegawai juga dilihat pada gambaran umum organisasi. Walaupun tingkat pendidikan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja Dinas Perikanan, namun hal tersebut menjadi syarat dasar ketetapan penerimaan PNS. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. PNS Dinas Perikanan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Strata II (S-2)	5	29
2	Strata I (S-1)	11	65
3	SLTA Sederajat	1	6
Jumlah		17	100

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 44 tahun 2022, susunan organisasi perangkat daerah Dinas Perikanan Kota Dumai terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional. Personalia yang telah menduduki jabatan struktural sesuai dengan struktur organisasi perangkat daerah telah ditetapkan sejumlah 9 orang terdiri dari eselon II sejumlah 1 orang, eselon III sejumlah 3 orang dan eselon IV sejumlah 5 orang. Uraian personalia tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Personalia Dinas Perikanan Kota Dumai yang Menduduki Jabatan Struktural

No	Jabatan	Nama Pejabat/NIP/Pangkat	Eselon
1.	Kepala Dinas	H. Afrilagan, S.H, M.Si NIP. 19720412 200112 1 003 Pembina Tk. I, (IV/b)	II
2.	Sekretaris	Isroyanti, S.Pi, M.Si NIP. 19760726 200212 2 014 Pembina Tk. I, (IV/b)	III/a
3.	Kepala Bidang Kenelayanan	Surya, S.Pi NIP. 19760526 200312 1 003 Penata Tk. I, (III/d)	III/b

No	Jabatan	Nama Pejabat/NIP/Pangkat	Eselon
4.	Kepala Bidang Pembudidaya ikan	Sri Gustiana Candra, S.Pi, M.Sc. NIP. 19750815 201001 2 012 Penata, (III/c)	III/b
5.	Kasubbag Tata Usaha	Ena Noviza, S.Sos NIP.19840913 200801 2 008 Penata (III/c)	IV/a
6.	Ka. UPT Benih Ikan Air Tawar	Refli Akmal, S.Sos NIP. 19710527 200604 1 002 Penata Muda Tk. I, (III/b)	IV/a
7.	Ka Subbag. Tata Usaha UPT Benih Ikan Air Tawar	Siti Masitah, S.Pi NIP. 19900509 201503 2 005 Penata, (III/c)	IV/b
8.	Ka. UPT Budidaya Air Payau	Teguh Wiyono, S.St.Pi NIP. 19720416 200003 1 002 Penata, (III/d)	IV/a
9.	Ka Subbag Tata Usaha UPT Budidaya Air Payau	Mohammad Faathir Ahadi, S.Pi NIP. 19861207 201503 1 005 Penata, (III/c)	IV/b

Sumber Data: Bagian Tata Usaha Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Selain jabatan struktural, juga terdapat kelompok jabatan fungsional yang kedudukannya langsung berada di bawah Kepala Dinas Perikanan Kota Dumai. Ada 6 (enam) orang yang menduduki kelompok jabatan fungsional di Dinas Perikanan. Adapun susunan personalia kelompok jabatan fungsional adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Susunan Personalia Kelompok Jabatan Fungsional

No	Nama/NIP/Pangkat	Jabatan
1	Soetjie Poernama Sari, S.IK, MM NIP. 19870322 201503 2 002 Penata, III/c	Perencana Ahli Muda Hasil Penyetaraan
2	Maizul, S.Pi NIP. 19671219 200112 1 002 Penata Tk. I, III/d	Penyuluh Perikanan Ahli Muda Hasil Penyetaraan
3	Nazifah, S.Pi NIP. 19701125 200003 2 003 Penata Tk. I, III/d	
4	Farhan, S.Pi, M.Si NIP. 19731018 200003 1 002 Pembina, IV/a	Pengawas Perikanan Ahli Muda Hasil Penyetaraan
5	Neldi, S.Pi NIP. 19750129 200212 1 003 Penata Tk. I, III/d	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda Hasil Penyetaraan

Sumber: Bagian Tata Usaha Dinas Perikanan Kota Dumai

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana diperlukan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas di Dinas Perikanan Kota Dumai. Adapun sarana dan prasarana tersebut meliputi bangunan Gedung kantor, mebeleur, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain sebagainya.

Secara umum, Dinas Perikanan Kota Dumai telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang belum memadai. Data peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kota Dumai dapat dilihat dalam buku inventaris

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Gambaran kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai 5 (lima) tahun terakhir mengacu kepada sasaran strategis Dinas Perikanan Kota Dumai yang telah ditentukan dalam Renstra sebelumnya. Kegiatan utama usaha sektor perikanan di Kota Dumai adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi dalam penyediaan dan keragaman bahan pangan dari protein hewani. Namun hal tersebut perlu mendapat perhatian khusus dalam pengembangan usaha penangkapan, budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Dalam penyelenggaraan urusan perikanan selama, terdapat 1 (satu) sasaran strategis Dinas Perikanan Kota Dumai, yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya dengan indikator kinerja utama, meliputi:

1. Produksi perikanan budidaya;
2. Produksi perikanan ikan;
3. Cakupan bina kelompok budidaya;
4. Cakupan bina kelompok nelayan; dan
5. Angka konsumsi ikan.

Tabel 6. T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Kinerja Tahun ke (%)				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi Perikanan Budidaya (ton)				222,9	238,5	255,2	273,1	292,18	342,4	256,6	256,6	284,9	311,8	153,6%	107,6%	100,6%	104,3%	106,7%
2	Produksi Perikanan Tangkap (ton)				275,4	289,2	303,7	318,8	334,77	930,8	571,7	812,6	585,8	710,6	338,0%	197,7%	267,6%	183,7%	212,3%
3	Cakupan Bina Kelompok Budidaya (kelompok)				25	28	31	34	40	25	28	31	34	37	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	92,5%
4	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (kelompok)				28	31	34	37	37	26	28	29	29	32	92,9%	90,3%	85,3%	78,4%	86,5%
5	Angka Konsumsi Ikan (kg/Kap/Tahun)				31	31	31	31	31	40,51	40,16	45,51	44,75	45,19	130,7%	129,5%	146,8%	144,4%	145,8%

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

Indikator kinerja terkait produksi perikanan tangkap dan perikanan budaya tahun 2017 s/d 2021, capaian kinerja selalu melebihi target. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja, meliputi peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya baik yang bersumber dari dana DAK maupun APBD dengan output penyediaan berjalan dengan lancar sehingga mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya. Selain itu, kegiatan yang terkait dengan peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan nelayan dan budidaya telah berjalan dengan lancar dan menghasilkan output yang mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya. Khusus bidang budidaya, peningkatan produksi didukung dengan pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan yang telah berjalan dengan baik.

Berdasarkan Tabel 6, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2017-2021, ada 4 (empat) indikator kinerja yang melebihi target, yaitu produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, cakupan bina kelompok budidaya dan angka konsumsi ikan. Sedangkan cakupan bina kelompok nelayan tidak mencapai target. Pada tahun 2021, cakupan bina kelompok budidaya dan cakupan bina kelompok nelayan tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. pandemi Covid-19, yang membuat ruang lingkup pembinaan dan pendampingan terbatas;
2. banyak anggota kelompok tidak aktif lagi melakukan aktivitas penangkapan ikan dan budidaya;
3. pergantian profesi menjadi buruh di perusahaan swasta; dan
4. terbatasnya modal, sarana dan prasarana untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan dan budidaya.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan akan memacu produksi tangkap yang selanjutnya diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi akan protein di Kota Dumai. Produksi perikanan budidaya naik tidak terlepas dari kegiatan pelatihan intensifikasi budidaya perikanan bagi pemula. Pelatihan pengembangan usaha kecil seperti pelatihan teknis budidaya.

Perikanan budidaya air payau merupakan usaha yang dibuka pada awal tahun 2001 dengan pembangunan tambak di Sei. Geniot. Namun usaha ini terus mengalami kemunduran. Hal ini karena kenaikan ongkos produksi yang terjadi setiap tahun sedangkan hasil produksi yang bernilai stabil. Upaya institusi dalam menyikapi permasalahan budidaya air payau dengan cara mencari jenis budidaya alternatif salah satu adalah uji coba budidaya ikan bandeng, budidaya kerapu, dan budidaya kakap. Namun dalam perjalanannya usaha budidaya bandeng menjadi usaha yang paling mampu dilakukan oleh masyarakat, tapi masih memiliki permasalahan dalam bidang pemasaran produksi.

Tak kalah penting dalam peningkatan produksi perikanan adalah kegiatan yang melestarikan lingkungan perikanan. hal ini penting mengingat usaha perikanan adalah usaha yang *renewable* atau dapat dikitar semula. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan perikanan, yaitu:

1. Mengurangi penggunaan kantong plastik atau penggunaan kantong sekali pakai.
2. Tidak membuang sampah ke laut atau membuang sampah sembarangan.
3. Hemat energi dan hemar air
4. Mendaur ulang sampah plastik menjadi barang yang tepat guna
5. Menggunakan angkutan umum untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mencegah terjadinya hujan asam yang dapat merusak ekosistem air
6. Menjaga kelestarian terumbu karang dan melakukan reboisasi pantai dengan tanaman bakau

Dalam pelaksanaannya, pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam mengelola sumberdaya ikan. Keterlibatan pemerintah di dalam pengelolaan sumberdaya ikan dapat diwujudkan dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu:

1. Fungsi alokasi, yang dijalankan melalui regulasi untuk membagi sumberdaya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
2. Fungsi distribusi, dijalankan oleh pemerintah agar terwujud keadilan dan kewajaran sesuai pengorbanan dan biaya yang dipikul oleh setiap

orang, disamping adanya keberpihakan pemerintah kepada mereka yang terisih atau lebih lemah

3. Fungsi stabilisasi, ditujukan agar kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan tidak berpotensi menimbulkan insabilitas yang dapat merusak dan menghancurkan tatanan sosial ekonomi masyarakat.

Realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perikanan Kota Dumai pada tahun 2017-2020 sudah dapat dikatakan baik dan mengalami peningkatan meskipun ada beberapa kegiatan yang belum dapat terealisasi sepenuhnya. Hal ini dikarenakan terjadinya rasionalisasi anggaran terutama pada tahun 2020 akibat dari pandemi covid-19. Adapun realisasi anggaran pada tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel 7.

Pada tahun 2021, program dan sub kegiatan yang digunakan tidak sama dengan program dan subkegiatan pada tahun 2017-2021. Pada tahun 2021, realisasi anggaran lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020. Meskipun pada tahun 2021 juga terjadi rasionalisasi anggaran, namun hal tersebut tidak berdampak pada pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya, anggaran dan realisasi pendanaan pada tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini. Untuk penjabaran anggaran dan realisasi pendanaan pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini. Anggaran dan realisasi pendanaan pada tahun 2017-2020 dan 2021 berbeda tabel dikarenakan penamaan program/kegiatan/subkegiatan berbeda.

Tabel 7. T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2017-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.616.463.754	1.887.538.000	1.786.039.393	1.887.529.001	1.606.971.600	1.730.647.931	1.086.861.164	682.819.812	99	92	61	36	1.794.392.537	1.276.825.127
Penyediaan jasa surat menyurat	2.400.000	2.400.000	2.670.000	2.400.000	2.208.000	448.000	1.370.000	825.000	92	19	51	34	2.467.500	1.212.750
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	847.653.204	897.369.000	234.628.792	213.104.800	838.878.300	802.463.564	159.087.051	169.719.532	99	89	68	80	548.188.949	492.537.112
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	23.360.000	76.780.000	9.820.000	9.820.000	23.310.000	76.780.000	9.670.000	0	100	100	98	81	29.945.000	27.440.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	12.800.000	9.050.000	9.955.000	9.955.000	12.620.000	7.909.349	8.094.742	6.788.875	99	87	81	82	10.440.000	8.853.242
Penyediaan jasa kebersihan kantor	80.893.600	88.719.200	118.279.020	118.279.020	80.854.000	85.853.600	73.799.020	79.980.000	100	97	62	83	101.542.710	80.121.655
Penyediaan alat tulis kantor	78.312.000	82.567.250	173.692.870	216.077.958	78.312.000	82.567.000	71.477.000	59.563.000	100	100	41	84	137.662.520	72.979.750
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.947.000	40.266.000	49.729.800	55.769.700	35.910.000	36.240.000	32.760.000	7.620.000	100	90	66	85	45.428.125	28.132.500
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19.247.950	25.432.050	26.676.465	80.489.923	19.185.000	7.500.000	17.045.000	0	100	29	64	86	37.961.597	10.932.500
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	22.700.000	80.659.846	78.500.000	0	0	30.605.950	0	0	0	38	87	45.464.962	7.651.488
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.050.000	14.400.000	7.200.000	7.200.000	5.030.000	7.930.000	7.200.000	6.900.000	100	55	100	88	8.462.500	6.765.000
Penyediaan makanan dan minuman	16.500.000	20.700.000	21.870.000	24.975.000	16.383.000	16.575.000	26.895.000	3.900.000	99	80	123	89	21.011.250	15.938.250
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	281.900.000	381.254.500	845.057.600	845.057.600	281.881.300	380.781.418	443.057.401	133.323.405	100	100	52	90	588.317.425	309.760.881
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	74.400.000	81.900.000	61.800.000	81.900.000	74.400.000	81.600.000	61.800.000	61.200.000	100	100	100	91	75.000.000	69.750.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	138.000.000	144.000.000	144.000.000	144.000.000	138.000.000	144.000.000	144.000.000	153.000.000	100	100	100	92	142.500.000	144.750.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	341.048.500	406.981.704	336.746.882	401.981.704	332.462.000	391.093.967	652.552.305	244.099.600	97	96	194	94	371.689.698	405.051.968
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0	11.000.000	5.000.000	0	0	7.998.980	0	0	0	73	95	4.000.000	1.999.745
Pengadaan mebeleur	0	0	17.100.000	9.500.000	0	0	18.000.000	0	0	0	105	96	6.650.000	4.500.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	19.000.000	0	80.000.000	0	17.000.000	323.081.000	0	0	89	0	97	24.750.000	85.020.250
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	310.744.500	365.985.704	291.744.011	291.545.704	307.954.800	355.493.967	287.536.325	237.633.600	99	97	99	98	315.004.980	297.154.673
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	30.304.000	21.996.000	16.902.871	15.936.000	24.507.200	18.600.000	15.936.000	6.466.000	81	85	94	99	21.284.718	16.377.300
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	81.842.000	59.709.000	59.731.500	79.884.113	80.679.100	59.274.200	67.557.000	0	99	99	113	101	70.291.653	51.877.575
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPERANGKAT DAERAH	39.552.000	29.739.000	39.761.500	59.914.113	38.531.000	29.419.200	47.952.000	0	97	99	121	102	42.241.653	28.975.550
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	9.150.000	10.000.000	0	0	9.010.000	9.885.000	0	0	98	99	0	103	4.787.500	4.723.750

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	33.140.000	19.970.000	19.970.000	19.970.000	33.138.100	19.970.000	19.605.000	0	100	100	98	104	23.262.500	18.178.275
Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	0	0	45.000.000	45.000.000	0	0	42.309.090	0	0	0	94	106	22.500.000	10.577.273
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	0	0	45.000.000	45.000.000	0	0	42.309.090	0	0	0	94	107	22.500.000	10.577.273
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	22.000.000	0	0	0	73	109	15.000.000	5.500.000
Pengelolaan Barang Milik Perangkat daerah	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	22.000.000	0	0	0	73	110	15.000.000	5.500.000
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	454.611.800	568.000.000	670.000.000	500.000.000	454.350.000	536.601.263	706.049.313	126.850.000	100	1	105	112	548.152.950	455.962.644
Pengembangan bibit ikan unggul	348.691.800	309.731.400	179.731.400	159.731.400	348.640.000	307.738.900	259.434.802	0	100	1	144	113	249.471.500	228.953.426
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	105.920.000	140.000.000	137.323.600	137.323.600	105.710.000	124.300.000	134.840.000	122.800.000	100	1	98	114	130.141.800	121.912.500
Pembinaan dan pengembangan perikanan	0	74.590.000	239.590.000	89.590.000	0	65.607.363	209.971.500	0	0	1	88	115	100.942.500	68.894.716
Peningkatan SDM pelaku usaha perikanan	0	43.678.600	43.355.000	43.355.000	0	38.955.000	43.130.000	0	0	1	99	116	32.597.150	20.521.250
Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	0	0	70.000.000	70.000.000	0	0	58.673.011	4.050.000	0	0	84	117	35.000.000	15.680.753
Program pengembangan perikanan tangkap	235.585.000	401.000.000	510.000.000	400.000.000	235.109.200	395.757.800	662.980.400	110.575.000	100	1	130	119	386.646.250	351.105.600
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	70.730.000	203.050.000	390.100.000	400.000.000	70.334.200	202.445.800	662.980.400	110.575.000	99	1	170	120	265.970.000	261.583.850
Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan	164.855.000	197.950.000	119.900.000	0	164.775.000	193.312.000	0	0	100	1	0	121	120.676.250	89.521.750
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	49.650.000	150.000.000	82.909.846	75.400.000	49.491.200	0	91.431.901	99.610.000	100	0	110	123	89.489.962	60.133.275
Peningkatan keanekaragaman produk pengolahan hasil perikanan	49.650.000	150.000.000	82.909.846	75.400.000	49.491.200	0	91.431.901	99.610.000	100	0	110	124	89.489.962	60.133.275
Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	174.504.996	305.535.946	223.378.609	329.629.923	174.458.000	202.078.184	363.532.000	40.800.000	100	1	163	126	258.262.369	195.217.046
Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi budidaya perikanan	174.504.996	305.535.946	223.378.609	329.629.923	174.458.000	202.078.184	363.532.000	40.800.000	100	1	163	127	258.262.369	195.217.046

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

Tabel 8. T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.558.092.859	4.945.352.155	88,98%
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	56.995.000	56.972.500	99,96%
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPERANGKAT DAERAH	56.995.000	56.972.500	99,96%
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	3.785.899.611	3.196.410.551	84,43%
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.785.899.611	3.196.410.551	84,43%
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	97.113.347	96.649.000	99,52%
3.25.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPERANGKAT DAERAH	97.113.347	96.649.000	99,52%
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	300.191.207	299.368.000	99,73%
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.669.605	5.668.000	99,97%
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.997.130	83.996.000	100,00%
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.992.000	12.992.000	100,00%
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.597.447	18.777.000	95,81%
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.643.025	7.643.000	100,00%
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPERANGKAT DAERAH	170.292.000	170.292.000	100,00%
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.081.156.996	1.066.259.554	98,62%
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.300.000	1.300.000	100,00%
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.800.000	226.105.554	99,69%
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	853.056.996	838.854.000	98,34%
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.736.698	229.692.550	97,02%
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.440.928	219.093.550	97,18%
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.295.770	10.599.000	93,83%
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	512.100.000	499.100.300	97,46%
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	450.000.000	437.000.300	97,11%
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	420.650.000	407.650.300	96,91%
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	29.350.000	29.350.000	100,00%
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	62.100.000	62.100.000	100,00%

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	62.100.000	62.100.000	100,00%
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.159.600.400	1.112.371.519	95,93%
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	62.332.250	62.331.350	100,00%
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan. Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan. Teknologi dan Informasi. serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	62.332.250	62.331.350	100,00%
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.097.268.150	1.050.040.169	95,70%
3.25.4.2.04.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	848.958.050	846.886.199	99,76%
3.25.4.2.04.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	180.800.000	138.769.650	76,75%
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.510.100	34.384.320	91,67%
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	30.000.000	30.000.000	100,00%
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	527.862.985	463.818.485	87,87%
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	527.862.985	463.818.485	87,87%
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	527.862.985	463.818.485	87,87%
PAGU ANGGARAN		7.757.656.244	7.020.642.459	90,50%

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah

Rencana strategis disusun dengan berbagai tahapan, salah satu aspek penting dalam penyusunan adalah identifikasi dan/atau klarifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang perikanan, termasuk faktor luar berupa tantangan dan peluang. Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kota Dumai dalam pencapaian sasaran dan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perikanan Kota Dumai.
2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan di Kota Dumai.
3. Keterbatasan kewenangan Dinas Perikanan Kota Dumai dalam sub Urusan Kelautan dan Perikanan.
4. Keterbatasan keterampilan nelayan dan pembudidaya ikan dalam mengembangkan aktivitasnya dibidang perikanan.
5. Belum optimalnya penyajian data statistik perikanan di Kota Dumai.
6. Terjadinya pandemi Covid-19 yang terutama berdampak pada pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, sehingga perencanaan yang telah disusun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
7. Adanya perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian di daerah.
8. Penyesuaian satuan target indikator kinerja utama berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selain tantangan, ada peluang pengembangan pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai, yaitu sebagai berikut.

1. Posisi kota Dumai yang strategis yang bisa dilewati dari udara, laut dan darat. Selain itu, lokasinya berdekatan dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, merupakan kawasan minapolitan, dan Kawasan strategis nasional di bidang ekonomi perikanan dan kelautan.
2. Bidang perikanan merupakan salah satu prioritas dalam proses pembangunan Nasional dan Daerah. Dukungan pemerintah pusat dan provinsi Riau dalam memajukan pembanguan bidang perikanan terus berlanjut dengan memprioritaskan arah dan kebijakan pembangunan nasional yang meletakkan bidang perikanan sebagai salah satu prioritas pembangunan melalui pemanfaatan sumberdaya perikanan yang optimal dan lestari.
3. Perkembangan inovasi dan teknologi dibidang perikanan. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi perikanan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat perikanan.
4. Peningkatan angka konsumsi ikan Kota Dumai. Angka konsumsi ikan di Kota Dumai mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini seiring dengan dukungan pemerintah melalui program sosialisasi GEMARIKAN yang sasarannya adalah anak usia dini. Selain meningkatkan angka konsumsi ikan, secara tidak langsung program GEMARIKAN merupakan salah satu upaya dalam kegiatan penurunan angka stunting di Kota Dumai.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan terbitnya peraturan tersebut, dapat mewujudkan biokrasi yang lebih dinamis, terwujudnya profesionalitas ASN, fokus pada pekerjaan fungsional, percepatan sistem kerja, pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah

Dinas Perikanan Kota Dumai merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang tugas dan fungsinya pada urusan bidang kelautan dan perikanan ini menjadi salah satu terjaminnya ketersediaan pangan daerah Kota Dumai. Hal ini dicerminkan melalui misi kesatu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai tahun 2021-2026. Kebijakan dan strategi urusan bidang kelautan dan perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan, dan memenuhi ketersediaan pangan utama, sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan protein asal hewani dan protein asal ikan di Kota Dumai, Provinsi Riau dan juga di luar provinsi. Oleh karena itu, guna mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai, maka dipetakan permasalahan sebagai berikut:

Tabel 9. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan pelaku usaha perikanan	- Masih rendahnya produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya untuk peningkatan kesejahteraan	- Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap dan budidaya - Minimnya modal yang dimiliki untuk peningkatan usaha - Penggunaan teknologi yang masih sederhana
2.	Penurunan potensi sumber daya ikan	Degradasi lingkungan	- Wilayah penangkapan merupakan wilayah pelayaran - Masih menggunakan alat penangkap ikan tidak ramah lingkungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<ul style="list-style-type: none"> - Rusaknya ekosistem hutan mangrove - Limbah industri
3.	Nilai tambah produk perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya diversifikasi olahan produk perikanan - Pengolahan belum sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan bahan baku yang terbatas - Kurangnya pengetahuan dan manfaat yang didapat dari diversifikasi olahan produk perikanan - Teknologi yang digunakan masih tradisional - Tidak memiliki jaringan pemasaran - Belum memiliki izin usaha - Sarana dan prasarana tidak mendukung
4.	Angka Konsumsi Ikan	Angka konsumsi ikan masih di bawah standar provinsi dan nasional	<ul style="list-style-type: none"> - manfaat konsumsi ikan - Ikan dianggap tidak memiliki nilai gizi dibandingkan produk hewan lainnya, seperti daging sapi dan ayam - tidak ada variasi menu/olahan ikan yang membuat masyarakat gemar makan ikan
5.	Pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan belum optimal	Wewenang Kabupaten/Kota terkait pengawasan di wilayah perairan umum	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran - Tidak memiliki sarana, prasarana dan aparatur Dinas

Berdasarkan hasil identifikasi dari tugas dan fungsinya, maka beberapa faktor kunci yang bisa diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sarana Prasarana dibandingkan dengan luas wilayah Kota Dumai lebih memadai.

2. Keterbatasan sumber dana untuk sektor perikanan yang menjadi titik krusial dalam menjalankan kegiatan/program yang efektif dan efisien.
3. Kejelasan target/sasaran program/kegiatan sehingga tidak terjadi salah sasaran.
4. Peningkatan produksi dan produktivitas pembibitan dan pembenihan sehingga bisa menghasilkan bibit unggul lokal dan benih unggul produk unggulan.
5. Pengembangan budidaya perikanan yang mampu meningkatkan produksi pembudidaya ikan lokal untuk mengurangi ketergantungan produk dari luar kota.
6. Peningkatan teknologi kelautan dan perikanan tepat guna di masyarakat sehingga dapat memudahkan dalam budidaya ikan.
7. Pengembangan pakan alami, sehingga agar dapat meringankan biaya produksi.
8. Peningkatan pemasaran dengan pengolahan ikan beragam dan bervariasi.
9. Peningkatan kelembagaan perikanan yang mendukung produktivitas budidaya ikan.
10. Pengembangan infrastruktur dibidang kelautan dan perikanan yang mendukung upaya perbibitan, pembenihan, budidaya dan pemasaran hasil produksi.
11. Pemanfaatan lahan kritis untuk usaha perikanan, meminimalisasi degradasi lingkungan pesisir, penataan ruang produksi perikanan.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah merupakan pandangan ke depan yang menggambarkan arah, dan tujuan yang ingin dicapai guna menyamakan komitmen seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Kota Dumai. Visi yang dituangkan dalam RPJMD, dirumuskan, dibahas, dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah

secara partisipatif. Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Adapun Visi RPJMD Provinsi Riau adalah: **“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”**.

Mengacu kepada Visi Provinsi Riau dan dengan memperhatikan kondisi existing, maka ditetapkan Visi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2021 -2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

1. Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri. Kota Dumai terletak di pesisir timur pulau Sumatera merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri.
2. Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.
3. Tahun 2026 merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

3.2.2 Misi

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik

Berdasarkan keterangan di atas, untuk merealisasikan visi, misi yang mendukung kegiatan perikanan adalah Misi 1, yaitu **Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dan Bertumpu pada Kepelabuhanan dan Industri**. Misi ini akan ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai kota Pelabuhan dan industri yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip *cooperative*, perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga profesional (RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026).

Adapun untuk mendukung misi ini, Dinas Perikanan Kota Dumai mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan tangkap. Tolak ukur dari tujuan tersebut adalah jumlah produksi perikanan dalam satuan ton. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya yang meliputi (1) produksi perikanan tangkap, (2) produksi perikanan budidaya, (3) cakupan bina kelompok nelayan, (4) cakupan bina kelompok budidaya, dan (5) angka konsumsi ikan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel di bawah ini (Tabel 10)

Tabel 10. Kaitan Misi, Tujuan, Sasaran Kota Dumai dengan Peran Dinas Perikanan Kota Dumai

No	Misi Kepala Daerah	Tujuan Kota	Sasaran Kota	Tujuan Perangkat daerah	Sasaran Perangkat daerah
1	Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dan Bertumpu pada Kepelabuhanan dan Industri	Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada Dinas Perikanan Kota Dumai terhadap pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada Dinas Perikanan Kota Dumai

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan bertumpu pada Budaya Melayu				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan PERANGKAT DAERAH	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya Saing dan bertumpu pada Kepelabuhanan dan Industri			
	Program : 1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Pengelolaan Perikanan Budidaya 3. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 4. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Data dan informasi hasil produksi perikanan tangkap yang belum akurat	1. Tidak adanya kemudahan teknologi dalam penginputan data, baik itu berupa database, maupun penggunaan aplikasi 2. Mahalnya biaya input produksi perikanan	1. Komitmen Pimpinan
		Penurunan potensi sumberdaya perikanan	1. Tidak memiliki <i>fishing ground</i> karena merupakan jalur pelayaran. 2. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan 3. Ekosistem mangrove yang semakin sempit dan rusak 4. Limbah industri	1. Perlu peninjauan kembali tentang wilayah fishing ground dan jalur pelayaran 2. Terciptanya alat tangkah ramah lingkungan yang bisa meningkatkan hasil pendapatan nelayan 3. Sosialisasi dan sharing ilmu/pengetahuan tentang dampak negatif penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan 4. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keberadaan mangrove. 5. Penanaman mangrove sesuai dengan pola tanam dan jenis mangrove 6. Perlunya komitmen pemerintah dan pihak terkait tentang pengelolaan limbah industri, sehingga tidak mengganggu ekosistem laut
		Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan tangkap	Rendahnya daya saing masyarakat nelayan dalam meningkatkan kualitas	1. Kemudahan dalam akses ilmu, pengetahuan dan teknologi

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan bertumpu pada Budaya Melayu				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan PERANGKAT DAERAH	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			hidupnya	<ul style="list-style-type: none"> untuk menunjang aktivitas penangkapan ikan di laut 2. Kemudahan dalam akses permodalan. 3. Manajemen SDM dan keuangan 4. Penguatan kelembagaan/KUB nelayan
		<i>Illegal fishing</i>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan di bawah kewenangan DKP Provinsi Riau, sehingga sulit dalam melakukan koordinasi 2. Tidak ada sarana dan prasarana pendukung 3. tidak memiliki SDM yang terampil dan profesional dibidangnya 4. Tidak ada sanksi hukum 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pimpinan dan stakeholder terkait 2. Penyediaan dan penempatan tenaga aparatur yang berkompeten dan tepat. 3. Tersedianya regulasi kelautan dan perikanan
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan Daya Saing Produk 2. Meningkatkan nilai jual produk 3. Meningkatkan keanekaragaman pangan asal bahan ikan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Belum kuatnya kelembagaan pengolahan hasil perikanan 2. Belum kontinu bahan baku dasar pengolahan produk perikanan 3. Masih rendahnya promosi hasil produk perikanan 4. Belum optimal sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya kelompok pengolahan 2. Dukungan sarana produksi, promosi dan pemasaran.
		Pemenuhan nilai konsumsi ikan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tingginya harga ikan dibandingkan protein hewani lainnya 2. Kurangnya sosialisasi tentang manfaat/kandungan gizi ikan 3. Kurangnya variasi menu/olahan produk perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memiliki potensi kawasan pengembangan pangan 2. Gencarnya promosi makan ikan melalui promosi Gemarikan dan Forikan.
		Belum optimalnya pengawasan sumberdaya kelautan dan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada regulasi yang mengatur pengawasan sumberdaya kelautan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pimpinan dan stakeholder terkait

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan bertumpu pada Budaya Melayu				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan PERANGKAT DAERAH	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		perikanan di wilayah sungai, waduk, danau, rawa dan genangan air lainnya	<p>dan perikanan di wilayah sungai waduk, danau, rawa dan genangan air lainnya.</p> <p>2. Minimnya SDM dan sarana prasarana yang mendukung kegiatan tersebut</p>	2. Rekrutmen dan penempatan aparatur dinas sesuai dengan kompetensi bidangnya

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

3.3 Telaahan Rencana strategis K/L dan Rencana strategis Provinsi

Pembangunan tidak akan terwujud dengan baik apabila di lakukan oleh satu daerah saja, tetapi juga harus di dukung oleh pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat yang memiliki tugas dan fungsi yang sama. Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana tingkat kota saja tetapi juga harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh tingkat pemerintahan provinsi maupun pusat.

Telaah terhadap rencana strategi K/L dan rencana strategis provinsi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam rencana strategis perangkat daerah kabupaten/kota. Kabupaten/Kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara rencana strategis perangkat daerah Kabupaten/Kota dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan Provinsi, Kabupaten/Kota.

3.3.1 Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020-2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak menetapkan visi dan misi tetapi menjabarkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI. Dimana Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu: **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong"**.

Visi tersebut kemudian dijabarkan KKP menjadi: **"Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong"**. Untuk melaksanakan visi tersebut, didukung oleh 4 (empat) Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020- 2024 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

Empat misi di atas dijabarkan sebagai berikut, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dari penjabaran Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan 9 (Sembilan) sasaran strategis yang hendak dicapai, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;
- b. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;
- c. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;
- d. Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat;
- e. Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan;
- f. Tatakelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab;
- g. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
- h. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif
- i. Tata kelola pemerintahan yang baik

Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sektor Kelautan dan Perikanan, yaitu:

1. Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, penerimaan negara dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat.
2. Mengoptimalkan produksi perikanan tangkap sesuai potensi lestari untuk meningkatkan penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, dan

penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan.

3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait;
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan Perikanan.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Perikanan Kota Dumai sebenarnya hampir sama, hanya saja bahasa dan penulisan yang berbeda. Pada Dinas Perikanan Kota Dumai, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya. Peningkatan produksi tersebut sama dengan sasaran strategis KKP yaitu Industrialisasi KP berdaya saing, dimana salah satu indikatornya adalah produksi perikanan (Tabel 11)

Persamaan sasaran strategis tersebut mengakibatkan program dan kegiatan yang akan dilakukan KKP akan saling mendukung dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kota Dumai. Begitu juga dengan 5 (lima) arah kebijakan sektor Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan KKP, terutama arah kebijakan nomor 1 sampai dengan 3, yang mengoptimalkan produksi perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan selaras dengan rencana Dinas Perikanan Kota Dumai yang hendak meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan melalui peningkatan produksi. Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan KKP dapat disinkronkan dengan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai sehingga saling mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

3.3.2 Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Berdasarkan rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, tujuan yang ditetapkan adalah untuk menjabarkan misi ke-2 yaitu **mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan** dan misi ke-3 yaitu **mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing**, yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku perikanan
2. Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik

Dari tujuan tersebut di atas, ada sasaran dan indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai, yaitu

1. Meningkatnya produksi perikanan, dengan indikator kinerja sasaran adalah:
 - Jumlah produksi perikanan
2. Meningkatnya kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, dengan indikator kinerja sasaran adalah:
 - Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Meningkatnya tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan indikator kinerja sasaran adalah:
 - Persentase pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, transparan dan akuntabel, dengan indikator kinerja sasaran adalah:
 - Nilai akuntabilitas kinerja PERANGKAT DAERAH

Apabila dilihat tujuan ke satu dan sasaran strategis ke satu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, sama dengan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kota Dumai (Tabel 11). Persamaan tujuan dan sasaran strategis tersebut mengakibatkan program dan kegiatan yang akan dilakukan DKP Provinsi Riau akan saling mendukung dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kota Dumai. Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan DKP Provinsi Riau dapat disinkronkan dengan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai sehingga saling mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 12. Telaahan Rencana Strategis K/L, Provinsi dan Kota

No	Uraian	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis
1.	Kementerian/Lembaga (KKP)	Terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas manusia indonesia 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing 3. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya saing, pengembangan inovasi dan riset KP 2. Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap perekonomian nasional 3. Peningkatan kelestarian sumber daya KP 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat <ul style="list-style-type: none"> • Indeks kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (IKMKP) 2. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan produk domestik bruto • Nilai ekspor hasil perikanan • Konsumsi ikan 3. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan <ul style="list-style-type: none"> • Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman • Luas kawasan konservasi perairan 4. Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat <ul style="list-style-type: none"> • Persentase lulusan Pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industry (DUDI) dan wirausaha

No	Uraian	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis
					5. Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan <ul style="list-style-type: none"> • Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan 6. Tata kelola SDKP bertanggungjawab <ul style="list-style-type: none"> • WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola • Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir • Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan 7. Industrialisasi KP berdaya saing <ul style="list-style-type: none"> • Produksi perikanan • Produksi garam 8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif <ul style="list-style-type: none"> • Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing • Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan

No	Uraian	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis
					9. Tatakelola pemerintahan yang baik <ul style="list-style-type: none"> • Nilai kinerja reformasi birokrasi KKP • Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) KKP
2	Provinsi Kelautan dan Perikanan (Dinas dan Perikanan)		1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. 2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing	1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku perikanan 2. Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik	1. Meningkatnya produksi perikanan <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah produksi perikanan 2. Meningkatnya kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan <ul style="list-style-type: none"> • Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Meningkatnya tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil <ul style="list-style-type: none"> • Persentase pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan 4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, transparan dan akuntabel

No	Uraian	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis
					<ul style="list-style-type: none"> • Nilai akuntabilitas kinerja PERANGKAT DAERAH
3	Kota (Dinas Perikanan Kota Dumai)		Mengembangkan perekonomian kota yang bedaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya <ul style="list-style-type: none"> • Produksi perikanan tangkap • Produksi perikanan budidaya • Cakupan bina kelompok nelayan • Cakupan bina kelompok budidaya • Angka konsumsi ikan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039, dijelaskan bahwa penataan ruang wilayah kota bertujuan untuk mewujudkan kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri pengolahan yang maju, unggul dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kebijakan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang, adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan pelayanan pusat-pusat kegiatan fungsional, berhierarki, dan terintegrasi;
- b. peningkatan fungsi Kota sebagai pusat perdagangan dan jasa;
- c. pengembangan kawasan peruntukan industri berskala internasional yang berwawasan lingkungan;
- d. peningkatan fungsi kawasan industri pengolahan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. pengembangan infrastruktur untuk mendukung kegiatan-kegiatan perkotaan; dan
- f. perwujudan kawasan yang mendukung fungsi perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada 2 (dua) rencana pola ruang wilayah Kota Dumai yaitu kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Sesuai dengan pasal 29 pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019, dijelaskan bahwa kawasan peruntukkan budidaya dibagi menjadi 8 (delapan), yaitu sebagai berikut:

1. Kawasan hutan produksi
2. Kawasan pertanian
3. Kawasan perikanan
4. Kawasan peruntukkan industri
5. Kawasan pariwisata
6. Kawasan permukiman

7. Kawasan peruntukan lainnya
8. Kawasan pertahanan dan keamanan

Kawasan perikanan merupakan wilayah yang berdasarkan kondisi dan potensi ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan baik berupa penangkapan, budidaya, maupun industri pengolahan. Kawasan perikanan Kota Dumai seluas ± 1.051,06 Ha yang terletak di Kecamatan Sungai Sembilan dan merupakan kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi.

Pembangunan perikanan Kota Dumai mengacu pada Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Dumai yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hasil indikasi program Kota Dumai terkait perwujudan pola ruang Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 13. Indikasi Program Kota Dumai

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Sumber Pendanaan
Perwujudan Pola Ruang Kota Dumai				
1.	Ekonomi Kawasan			
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap			
	a. Bantuan pompong dan alat tangkap	Kecamatan Sungai Sembilan	2020	APBN KKP
	b. Budidaya Udang	Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai	2020	APBN KKP
	c. Pengembangan Kawasan Minapolitan	Kecamatan Sungai Sembilan	2020	APBN KKP
	d. Pengadaan Kapal Pengawasan Patroli Perikanan	Kecamatan Sungai Sembilan	2020-2021	APBN KKP

Sumber: Lampiran Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019

Pada sub bab ini juga dibahas faktor-faktor penghambat dan pendorong bagi pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai ditinjau dari implikasi RTRW dan kajian KLHS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 14. Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah Dinas Perikanan Kota Dumai Berdasarkan Sasaran RTRW

No	Sasaran RTRW	Permasalahan Pelayanan PERANGKAT DAERAH	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Bantuan pompong dan alat tangkap	Kewenangan yang terbatas	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014	Pemberdayaan nelayan kecil dalam meningkatkan pendapatan dan pemulihan ekonomi
2.	Budidaya Udang	Belum optimalnya pengembangan sentra budidaya air payau	<ul style="list-style-type: none"> - Akses transportasi yang sulit dijangkau - SDM yang rendah - Tumpang tindih pemanfaatan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki nilai ekonomis tinggi - Pangsa pasar luas
3.	Pengembangan Kawasan Minapolitan	Belum optimalnya pengembangan kawasan minapolitan di Kota Dumai	Keterbatasan anggaran	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
4.	Pengadaan Kapal Pengawasan Patroli Perikanan	Kewenangan yang terbatas	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014	Meningkatnya laporan pelanggaran dari nelayan

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat daerah mengamanatkan bahwa Rencana pembangunan Daerah

Pemerintah Daerah menyusun KLHS RPJMD dalam rangka mewujudkan RPJMD sesuai dengan prinsip berkelanjutan.

KLHS adalah instrumen pencegahan yang dimandatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk wajib dilaksanakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam memastikan perencanaan pembangunannya telah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kewajiban KLHS oleh pemerintah daerah juga ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembangunan daerah perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup di wilayahnya untuk menjamin kelayakan hidup bagi masyarakat. Daya dukung lingkungan perlu diperhatikan untuk menghasilkan lingkungan yang asri dan layak huni bagi warga Kota Dumai. Pembangunan lingkungan hidup berkaitan erat dengan peningkatan ketahanan bencana terutama bencana iklim yang diakibatkan oleh perubahan iklim akibat dari peningkatan gas rumah kaca.

Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut (iklim tropis basah) dengan kelembaban udara rata-rata berkisar 75-83%. Kondisi klimatologi seperti ini sangat mendukung pengembangan perumahan maupun perikanan. Berdasarkan data Tahun 2022, produksi perikanan tangkap mencapai 1.020,3 ton dan produksi perikanan budidaya mencapai 382,69 ton.

Berdasarkan analisis pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), Dinas Perikanan memiliki 1 (satu) indikator terkait pencapaian indikator TPB. Indikator tersebut adalah kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan dengan skor pola pangan harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan per kapita per kilogram per tahun. Berdasarkan data Tahun 2022, angka konsumsi ikan Kota Dumai adalah sebesar 49.64 kg/kapita/tahun.

Tabel 15. Capaian TPB Dinas Perikanan

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator	Indikator TPB	Keterangan Capaian	Permasalahan Pencapaian Target
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai	2.2.2. (c)	kualitas konsumsi pangan yang	Angka konsumsi ikan tahun 2022 sebesar 49.64	

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	No. Indikator	Indikator TPB	Keterangan Capaian	Permasalahan Pencapaian Target
	ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan		diindikasikan oleh skor pola pangan harapan dan tingkat konsumsi ikan	kg/kapita/tahu, di atas angka konsumsi ikan provinsi riau sebesar 46.54 kg/kapita/tahun dan di bawah dari target KKP sebesar 59.53 kg/kapita/tahun	

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2025

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pembangunan sektor ekonomi di Kota Dumai adalah salah satunya pembangunan bidang urusan kelautan dan perikanan, hal ini juga dituang dalam misi 1 (satu) dalam RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026. Hal ini di dasarkan pada potensi yang bisa dikembangkan di Kota Dumai namun pelaku usaha di bidang tersebut masih memiliki pendapat yang terendah dari sektor lain.

Membangun bidang perekonomian tidak hanya mengandalkan dan mengeksploitasi berbagai wilayah dan sektor unggulan tersebut. Keberlansungan (*sustainability*) dari kawasan atau wilayah tersebut juga harus dilestarikan, hal ini juga menjadi hal pokok yang diperhatikan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan menfokuskan bidang tersebut untuk menjaga keseimbangan kawasan pesisir.

Menganut pada dua persoalan diatas yang sama-sama penting dan memiliki keterkaitan yang kuat, maka ada beberapa isu-isu strategis yang di petik dari informasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai, Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian RI adalah sebagai berikut :

1. Nilai pendapatan pembudidaya ikan dan nelayan yang rendah di bandingkan pendapatan sektor lainnya, hal ini di pengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :
 - a) Permasalahan Kelembagaan pada pembudidaya ikan di Kota Dumai masih bersifat tradisional, sulitnya memberikan pemahaman karena sifat penyampaian informasi yang masih dari rumah ke

rumah, disamping memakan waktu lama, juga informasi atau introduksi teknologi diterjemahkan sendiri-sendiri oleh pembudidaya tersebut.

- b) Produk yang dihasilkan oleh pembudidaya ikan belum menjadi produk unggulan, sifatnya masih memenuhi kebutuhan ikan segar yang dihasilkan dalam jumlah cukup kecil, atau belum menjadi bahan baku industri perikanan.
 - c) Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Perikanan yang masih harus di benahi.
 - d) Terbatasnya prasarana yang tersedia dalam mengelola usaha perikanan,
 - e) Kurangnya pengawasan dan lemahnya manajemen informasi berbasis teknologi di lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan.
 - f) Rendahnya akses modal terhadap usaha pembudidaya ikan dan nelayan karena masih kurang kepercayaan pengendalian modal tersebut.
2. Masih tingginya degradasi lingkungan terutama kawasan pantai baik secara alami maupun secara kesengajaan seperti:
- a) penebangan hutan mangrove untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat pesisir.
 - b) Pembangunan daerah industri dan aktifitasnya di daerah *greenbelt* (sabuk hijau).
 - c) Kawasan dipengaruhi oleh ROB.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah

Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen penting dalam penjabaran visi dan misi daerah, khususnya Kota Dumai. Penetapan tujuan dan sasaran perlu dilakukan dalam bentuk terukur dan spesifik. Selain menjabarkan visi dan misi daerah, serta menjawab permasalahan pembangunan dan isu strategis, juga merupakan penyelarasan capaian indikator kinerja pembangunan Kota Dumai dengan indikator kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai.

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode jangka waktu tertentu dan dirumuskan dalam bentuk tindakan dan alokasi sumberdaya yang dapat diukur.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026, tujuan yang ingin dicapai Dinas Perikanan Kota Dumai sesuai dengan misi kesatu adalah **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan**. Sebagai tindak lanjut terhadap rumusan tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran Dinas Perikanan Kota Dumai adalah **Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya**. Sedangkan dalam mencapai sasaran tersebut ada 5 (lima) indikator kinerja yang diukur, yaitu sebagai berikut:

1. produksi perikanan budidaya;
2. produksi perikanan tangkap;
3. cakupan bina kelompok budidaya;
4. cakupan bina kelompok nelayan; dan
5. angka konsumsi ikan.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran sebagai implementasi visi dan misi ditetapkan pada Tabel 16 di bawah ini. Tujuan dan sasaran di atas, merupakan tujuan dan sasaran

Tabel 16. T-C. 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	%	100	100	100	100	100
			Produksi Perikanan Tangkap	%	100	100	100	100	100
			Cakupan Bina Kelompok budidaya	%	70	77.5	85	92.5	100
			Cakupan bina kelompok nelayan	%	69.23	76.92	84.62	92.31	100
			Angka Konsumsi Ikan	kg/ kapita/ tahun	49.64	50.1	50.6	51.1	51.6

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dinas Perikanan Kota Dumai

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran pemerintah Kota Dumai yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja capaian dalam 5 (lima) tahun. Strategi Dinas Perikanan dalam hal ini merupakan langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh untuk merealisasikan misi ke-1 Pemerintah Kota Dumai dengan sasaran meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan Pemerintah Kota Dumai disusun secara komprehensif agar dapat mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Dumai. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 15 menyatakan bahwa Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Untuk mewujudkan hal tersebut arah kebijakan dibuat untuk mengarahkan rumusan strategi yang telah ditetapkan. Perumusan strategi dilakukan berdasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Strategi yang realistis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
3. Mengevaluasi berbagai faktor internal dan eksternal dalam upaya merumuskan strategi yang tepat.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka strategi Dinas Perikanan Kota Dumai dalam mencapai visi dan misi Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.

Gambar 2. Diagram Analisis SWOT Perumusan Strategi Jangka Menengah

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang: 1. Berkembangnya inovasi dan teknologi di bidang perikanan 2. Meningkatnya konsumsi ikan di Kota Dumai 3. Letak Kota Dumai yang strategis	Tantangan: 1. Terbatasnya kewenangan Dinas Perikanan Kota Dumai akibat dari penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Menyatunya wilayah penangkapan dengan jalur pelayaran 3. Penurunan kualitas perairan 4. Pemasaran hasil perikanan yang belum sistematis 5. Pola 60emba masyarakat pesisir yang masih tradisional
Kekuatan: 1. SOTK Dinas Perikanan Kota Dumai yang jelas 2. Penyederhanaan birokrasi	Alternatif strategi: 1. Optimalisasi perikanan tangkap 2. Optimalisasi perikanan budidaya 3. Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	
Kelemahan: 1. Kurangnya sumber daya manusia perikanan dari segi kualitas maupun kuantitas 2. Belum memiliki sarana pendukung yang memadai		

Berdasarkan Gambar 2, dapat dilihat bahwa ada 3 (tiga) alternatif strategi yang dihasilkan dari perumusan strategi. Adapun alternatif strategi tersebut adalah (1) optimalisasi pengelolaan perikanan tangkap, (2) optimalisasi pengelolaan perikanan budidaya, dan (3) optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Ketiga alternatif strategi tersebut

diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kota Dumai yang telah ditetapkan untuk periode 2021-2026 (Tabel 17).

Tabel 17. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Dinas Perikanan Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dan Bertumpu pada Kepelabuhanan dan Industri		
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pengelolaan perikanan tangkap 2. Optimalisasi pengelolaan perikanan budidaya 3. Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

5.2 Arah Kebijakan Dinas Perikanan Kota Dumai

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah Kota Dumai, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas pencapaian tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Adapun arah kebijakan Dinas Perikanan Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 18. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI: TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU			
MISI I: MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN KOTA YANG BERDAYA SAING DAN BERTUMPU PADA KEPELABUHAN DAN INDUSTRI			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Optimalisasi pengelolaan perikanan tangkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil 2. Penyediaan data dan informasi perikanan tangkap 3. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap 4. Pengembangan kapasitas nelayan kecil 5. Fasilitasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha bagi nelayan kecil 6. Pembinaan, pendampingan dan pelatihan bagi nelayan kecil
		Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan 2. Pembinaan dan pemantauan serta pelatihan bagi pembudidaya ikan 3. Penyediaan data dan informasi perikanan budidaya 4. Pengembangan kapasitas pembudidayaan ikan 5. Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 6. Fasilitasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha bagi pembudidaya ikan
	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan volume dan nilai produksi perikanan 2. Inovasi olahan dan penerapan standarisasi produk

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan penjabaran secara rinci ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang disertai dengan indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Pada dasarnya, program kerja merupakan penjabaran secara rinci langkah-langkah yang harus diambil untuk memecahkan persoalan pembangunan perikanan secara sistematis dan berkesinambungan. Perumusan program dan kegiatan pembangunan Perikanan dan Kelautan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 sebagai payung hukum.

Mengacu kepada ketentuan tersebut, diharapkan program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Dumai dapat lebih terarah dan sinergi. Secara rinci, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 19. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPERANGKAT DAERAH 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPERANGKAT DAERAH 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPERANGKAT DAERAH 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPERANGKAT DAERAH

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
		<p>6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPERANGKAT DAERAH</p> <p>7. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</p> <p>Administrasi Keurangan Perangkat daerah</p> <p>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPERANGKAT DAERAH</p> <p>3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPERANGKAT DAERAH</p> <p>4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</p> <p>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah</p> <p>1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPERANGKAT DAERAH</p> <p>2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKOD</p> <p>3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPERANGKAT DAERAH</p> <p>4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPERANGKAT DAERAH</p> <p>5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPERANGKAT DAERAH</p> <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</p> <p>1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>Administrasi Umum Perangkat daerah</p> <p>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPERANGKAT DAERAH</p> <p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>3. Pengadaan Mebel</p> <p>4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>5. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
		<p>7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Pengelolaan Perikanan Tangkap	<p>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 2. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap <p>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 2. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 3. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Kecil <p>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) <p>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</p>

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT 2. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
3	Pengelolaan Perikanan Budidaya	<p>Penerbitan Izin Usaha Perikanan dibidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing 2. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing <p>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 2. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 3. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 4. Pemberitan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan <p>Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Persayaran dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDIPK) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota <p>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota 2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota 3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota 4. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 5. Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
		6. Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
4	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	<p>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Airl Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kab/Kota</p> <p>1. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kab/Kota</p>
5	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	<p>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</p> <p>1. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</p> <p>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</p> <p>1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengeolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</p> <p>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</p> <p>1. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</p> <p>2. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</p>

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja, target dan pendanaan indikatif untuk pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 5 (lima) tahun. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Dinas Perikanan selama periode 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 20. T-C.27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perikanan Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN										TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Rp.
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan budidaya		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Produksi perikanan tangkap		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan bina kelompok budidaya		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan bina kelompok Nelayan		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Angka konsumsi ikan		42 Kg/kapita/tahun		42 Kg/kapita/tahun		50.1 Kg/kapita/tahun		50.6 Kg/kapita/tahun		51.1 Kg/kapita/tahun		51.6 Kg/kapita/tahun		51.6 Kg/kapita/tahun		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	0%	100%	2.473.927.032	100%	7.699.918.219	100%	7.100.000.000	100%	7.850.000.000	100%	8.150.000.000	100%	8.400.000.000	100%	38.554.918.219
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	59.914.113	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	80.200.000	13 Dokumen	92.000.000	13 Dokumen	133.000.000	13 Dokumen	140.000.000	41 Dokumen	545.200.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	3 Dokumen	2.000.000	3 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	5.000.000	9 Dokumen	12.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen RKA-SKPERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPERANGKAT DAERAH	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	12.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPERANGKAT DAERAH	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	12.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen DPA-SKPERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPERANGKAT DAERAH	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	12.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPASKPERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPERANGKAT DAERAH	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	12.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPERANGKAT DAERAH	0 Laporan	4 Laporan	59.914.113	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	80.200.000	4 Laporan	80.000.000	4 Laporan	103.000.000	4 Laporan	110.000.000	20 Laporan	473.200.000		

Tujuan	Sasaran	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN												TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Rp.
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	3 Laporan	12.000.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen / Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	19.970.000	1 Dokumen	3.728.499.379	1 Dokumen	3.498.000.000	4 Dokumen	3.356.000.000	4 Dokumen	3.509.000.000	4 Dokumen	3.749.000.000	5 Dokumen	17.840.499.379
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan	0 Orang/ Bulan	0	25 Orang/ Bulan	3.728.499.379	25 Orang/ Bulan	3.498.000.000	25 Orang/ Bulan	3.350.000.000	25 Orang/ Bulan	3.500.000.000	25 Orang/ Bulan	3.740.000.000	25 Orang/ Bulan	17.816.499.379
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPERANGKAT DAERAH	0 Laporan	2 Laporan	19.970.000	0 Laporan	-	0 Laporan	-	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	3.000.000	2 Laporan	3.000.000	6 Laporan	8.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPERANGKAT DAERAH dan Laporan Koordinasi	0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	-	0 Laporan	-	7 Laporan	2.000.000	7 Laporan	3.000.000	7 Laporan	3.000.000	21 Laporan	8.000.000
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	3 Dokumen	8.000.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	75.000.000	6 Dokumen	86.000.000	6 Dokumen	110.000.000	6 Dokumen	101.000.000	10 Dokumen	447.000.000
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPERANGKAT DAERAH	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPERANGKAT DAERAH	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	90.000.000	2 Dokumen	90.000.000	10 Dokumen	405.000.000
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPERANGKAT DAERAH	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	2.000.000	3 Dokumen	9.000.000
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPERANGKAT DAERAH	0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	2.000.000	3 Laporan	9.000.000
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPERANGKAT DAERAH	0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	-	0 Laporan	-	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000	6 Laporan	15.000.000
		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPERANGKAT DAERAH	0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	-	0 Laporan	-	2 laporan	2.000.000	2 laporan	5.000.000	2 laporan	2.000.000	6 Laporan	9.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit	0 Unit	-	28 Unit	1.376.000.000	27 Unit	918.450.000	32 Unit	1.085.000.000	15 Unit	1.535.000.000	20 Unit	847.000.000	126 Unit	5.761.450.000
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	460.000.000	1 Unit	130.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	180.000.000	1 Unit	190.000.000	5 Unit	1.110.000.000
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	575.000.000	5 Unit	155.000.000	3 Unit	460.000.000	1 Unit	450.000.000	5 Unit	237.000.000	15 Unit	1.877.000.000

Tujuan	Sasaran	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN												TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Rp.
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	20 Unit	85.000.000	15 Unit	85.000.000	16 Unit	150.000.000	8 Unit	165.000.000	8 Unit	100.000.000	67 Unit	585.000.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	5 Unit	56.000.000	3 Unit	70.000.000	3 Unit	125.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	50.000.000	13 Unit	451.000.000
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	-	1 Unit	230.000.000	0 Unit	-	1 Unit	300.000.000	0 Unit	-	2 Unit	530.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	190.000.000	1 Unit	120.000.000	5 Unit	810.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	-	1 Unit	48.450.000	8 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000	4 Unit	150.000.000	15 Unit	398.450.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	185.000.000	1 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen	645.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	-	-	4 orang	110.000.000	6 orang	150.000.000	7 orang	185.000.000	8 orang	200.000.000	25 orang	645.000.000
		Administrasi Umum Perangkat daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	1.363.067.261	6 Dokumen	450.623.200	6 Dokumen	544.100.000	7 Dokumen	590.000.000	7 Dokumen	725.000.000	7 Dokumen	815.000.000	33 dokumen	3.124.723.200
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	91.568.228	4 Paket	7.500.000	4 Paket	10.000.000	1 Paket	15.000.000	4 Paket	25.000.000	4 Paket	15.000.000	20 Paket	72.500.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	292.834.683	4 Paket	197.000.000	4 Paket	180.000.000	4 Paket	190.000.000	4 Paket	250.000.000	4 Paket	300.000.000	20 Paket	1.117.000.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan								4 Paket	20.000.000	4 Paket	60.000.000	4 Paket	70.000.000	12 Paket	150.000.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	27.045.000	4 Paket	14.533.200	4 Paket	25.000.000	4 Paket	30.000.000	4 Paket	30.000.000	4 Paket	35.000.000	20 Paket	134.533.200
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	59.796.300	4 Paket	24.000.000	4 Paket	22.100.000	4 Paket	25.000.000	4 Paket	30.000.000	4 Paket	35.000.000	20 Paket	136.100.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	1 Dokumen	8.640.000	1 Dokumen	7.590.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	44.590.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPERANGKAT DAERAH	1 Laporan	1 Laporan	883.183.050	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	320.000.000	1 Laporan	350.000.000	5 Laporan	1.470.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	584.038.954	3 Laporan	1.322.000.000	3 Laporan	1.379.250.000	4 Laporan	1.133.000.000	4 Laporan	1.303.000.000	4 Laporan	1.473.000.000	18 Laporan	6.610.250.000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.640.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	5 Laporan	15.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	228.348.014	1 Laporan	289.000.000	1 Laporan	215.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	280.000.000	1 Laporan	330.000.000	5 Laporan	1.364.000.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Laporan							1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	140.000.000	3 Laporan	360.000.000

Tujuan	Sasaran	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN												TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Rp.
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	353.050.940	1 Laporan	1.030.000.000	1 Laporan	1.161.250.000	1 Laporan	780.000.000	1 Laporan	900.000.000	1 Laporan	1.000.000.000	5 Laporan	4.871.250.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 Unit	11 Unit	416.936.704	18 Unit	647.795.640	21 Unit	495.000.000	34 Unit	1.358.000.000	34 Unit	650.000.000	34 Unit	1.075.000.000	63 Unit	4.225.795.640
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	300.900.704	9 Unit	198.000.000	9 Unit	180.000.000	13 Unit	180.000.000	13 Unit	200.000.000	13 Unit	250.000.000	13 Unit	1.008.000.000
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	10 Unit	183.000.000	10 Unit	110.000.000	8 Unit	95.000.000	28 unit	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0	8 Unit	67.000.000	8 Unit	35.000.000	8 Unit	80.000.000	10 Unit	90.000.000	10 Unit	120.000.000	10 Unit	392.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000	1 Unit	382.795.640	4 Unit	280.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	230.000.000	8 Unit	1.642.795.640
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	1 Unit	1 Unit	16.036.000	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	215.000.000	0 Unit	-	1 Unit	200.000.000	2 Unit	415.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	200.000.000	0 Unit	-	1 Unit	180.000.000	2 Unit	380.000.000
		PENGLOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan kelompok nelayan terbina	18 kelompok	18 kelompok	400.000.000	69,23%	1.525.000.000	76,92%	1.725.000.000	84,61%	2.070.000.000	92,31%	2.400.000.000	100%	2.700.000.000	100%	8.085.000.000
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Perairan sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah perairan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya	Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	295.000.000	3 Dokumen	340.000.000	3 Dokumen	370.000.000	11 Dokumen	1.185.000.000
		Penyediaan Data dan Informasi sumber daya ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	Dokumen	0	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	180.000.000	5 Dokumen	720.000.000
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	-	1 Unit	50.000.000	1 Unit	80.000.000	1 Unit	90.000.000	3 Unit	220.000.000
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	Unit	0	0 Unit	0	0 unit	-	1 unit	65.000.000	1 unit	80.000.000	1 unit	100.000.000	3 Unit	245.000.000
		Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok nelayan yang tumbuh, berkembang dan meningkat keluarganya	18 kelompok	18 kelompok	400.000.000	18 kelompok	1.250.000.000	20 kelompok	1.150.000.000	22 kelompok	1.360.000.000	24 kelompok	1.635.000.000	26 kelompok	1.900.000.000	26 kelompok	4.960.000.000
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang	0 Orang	-	60 Orang	450.000.000	100 Orang	300.000.000	100 Orang	300.000.000	100 Orang	300.000.000	100 Orang	300.000.000	460 Orang	1.650.000.000

Tujuan	Sasaran	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN												TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Rp.
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	18 Kelompok	18 Kelompok	400.000.000	18 Kelompok	50.000.000	20 Kelompok	450.000.000	22 Kelompok	460.000.000	24 Kelompok	400.000.000	26 Kelompok	500.000.000	26 Kelompok	1.860.000.000
		Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyusunan Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	0 Unit Usaha	0 Kelompok	0	7 Unit Usaha	750.000.000	5 Unit Usaha	400.000.000	1 Unit Usaha	100.000.000	1 Unit Usaha	100.000.000	1 Unit Usaha	100.000.000	15 Unit Usaha	1.450.000.000
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	-	0 Unit	0	10 Unit	500.000.000	10 Unit	835.000.000	10 Unit	1.000.000.000	30 Unit	2.335.000.000
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah dokumen/laporan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	2 Dokumen	160.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	300.000.000	10 Dokumen	1.360.000.000
		Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	5 Dokumen	860.000.000
		Pelayanan Penyelenggaraan tempat pelelangan ikan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0 Layanan	0 Layanan	0	1 Layanan	100.000.000	1 Layanan	100.000.000	1 Layanan	100.000.000	1 Layanan	100.000.000	1 Layanan	100.000.000	5 Layanan	500.000.000
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembuatan tanda daftar kapal perikanan nelayan kecil ukuran kapal sampai dengan 5 GT sesuai dengan kewenangan daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	-	2 Dokumen	85.000.000	2 Dokumen	125.000.000	2 Dokumen	115.000.000	2 Dokumen	125.000.000	2 Dokumen	130.000.000	10 Dokumen	580.000.000
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	65.000.000	5 Dokumen	285.000.000
		Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Rekomendasi	0 Rekomendasi	0	10 Rekomendasi	50.000.000	30 Rekomendasi	50.000.000	30 Rekomendasi	65.000.000	30 Rekomendasi	65.000.000	30 Rekomendasi	65.000.000	130 Rekomendasi	295.000.000
		PENGLOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	26 kelompok	26 kelompok	229.731.400	70%	3.446.000.000	77,50%	3.568.000.000	85%	4.150.400.000	92,50%	4.650.000.000	100%	5.000.000.000	100%	20.814.400.000
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Untuk Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Rekomendasi	Rekomendasi	0	Rekomendasi	0	25 Rekomendasi	32.000.000	25 Rekomendasi	20.000.000	25 Rekomendasi	40.000.000	25 Rekomendasi	50.000.000	25 Rekomendasi	142.000.000

Tujuan	Sasaran	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN												TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Rp.
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Rekomendasi	Rekomendasi	0	Rekomendasi	0	25 Rekomendasi	32.000.000	25 Rekomendasi	20.000.000	25 Rekomendasi	40.000.000	25 Rekomendasi	50.000.000	100 Rekomendasi	142.000.000
		Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Rekomendasi	Rekomendasi	0	Rekomendasi	0	Rekomendasi	0	Rekomendasi	0	Rekomendasi	0	Rekomendasi	0	Rekomendasi	0
		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang tumbuh, berkembang dan meningkatkan keluasannya	25 Kelompok	0 Kelompok	-	31 Kelompok	1.180.000.000	34 Kelompok	1.102.000.000	37 kelompok	1.315.000.000	40 Kelompok	1.535.000.000	43 Kelompok	1.620.000.000	43 Kelompok	6.752.000.000
		Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	25 Kelompok	0 Kelompok	0	7 Kelompok	420.000.000	8 Kelompok	897.000.000	8 Kelompok	1.005.000.000	8 Kelompok	1.180.000.000	9 Kelompok	1.225.000.000	40 Kelompok	4.727.000.000
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelemagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelemagaan	25 Kelompok	0 Kelompok	0	25 Kelompok	50.000.000	25 Kelompok	50.000.000	30 Kelompok	80.000.000	35 Kelompok	85.000.000	40 Kelompok	95.000.000	40 Kelompok	360.000.000
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	25 Kelompok	0 Kelompok	0	25 Kelompok	510.000.000	25 Kelompok	5.000.000	30 Kelompok	30.000.000	35 Kelompok	40.000.000	40 Kelompok	50.000.000	40 Kelompok	635.000.000
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	25 Kelompok	0 Kelompok	0	25 Kelompok	200.000.000	25 Kelompok	150.000.000	30 Kelompok	200.000.000	35 Kelompok	230.000.000	40 Kelompok	250.000.000	40 Kelompok	1.030.000.000
		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan	Jumlah Dokumen Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi	25 Rekomendasi	0 Rekomendasi	-	25 Rekomendasi	100.000.000	0 Rekomendasi	0	25 Rekomendasi	25.000.000	25 Rekomendasi	40.000.000	25 Rekomendasi	55.000.000	125 Rekomendasi	220.000.000

Tujuan	Sasaran	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN												TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Rp.
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
		Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPK) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	25 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0	25 Rekomendasi	100.000.000	0 Rekomendasi	0	25 Rekomendasi	25.000.000	25 Rekomendasi	40.000.000	25 Rekomendasi	55.000.000	125 Rekomendasi	220.000.000
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	25 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0	25 Rekomendasi	100.000.000	0 Rekomendasi	0	25 Rekomendasi	25.000.000	25 Rekomendasi	40.000.000	25 Rekomendasi	55.000.000	125 Rekomendasi	220.000.000
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Dokumen/laporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	2 Dokumen	229.731.400	6 Dokumen	2.166.000.000	7 Dokumen	2.434.000.000	7 Dokumen	2.790.400.000	7 Dokumen	3.035.000.000	7 Dokumen	3.275.000.000	5 Dokumen	13.700.400.000
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	120.000.000	5 Dokumen	460.000.000
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	159.731.400	1 Unit	800.000.000	1 Unit	452.000.000	2 Unit	800.000.000	2 Unit	850.000.000	2 Unit	900.000.000	8 Unit	3.802.000.000
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	0 Unit	0	1 Unit	400.000.000	1 Unit	541.000.000	1 Unit	360.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	450.000.000	5 Unit	2.151.000.000
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	96.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	380.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	450.000.000	5 Dokumen	1.626.000.000
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	250 Orang	0 Orang	0	250 Orang	170.000.000	250 Orang	240.000.000	250 Orang	350.000.000	250 Orang	400.000.000	250 Orang	450.000.000	1.250 Orang	1.610.000.000
		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	1050 Ha	0 Ha	0	1050 Ha	600.000.000	1050 Ha	800.900.000	1050 Ha	750.000.000	1050 Ha	800.000.000	1050 Ha	810.000.000	1050 Ha	3.760.900.000
		Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	20 Orang	50.100.000	20 Orang	60.400.000	20 Orang	85.000.000	20 Orang	95.000.000	80 Orang	290.500.000
		PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase rekomendasi yang dikeluarkan	100%	100%	-	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	180.000.000	100%	210.000.000	100%	250.000.000	100%	890.000.000
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	250.000.000	5 Dokumen	890.000.000

Tujuan	Sasaran	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN										TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Rp.
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	0 Bulan	0	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	250.000.000	5 Dokumen	890.000.000
		PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase wilayah sampel aki	100%	100%	75.400.000	100%	678.310.000	100%	1.215.582.295	100%	1.580.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.900.000.000	100%	7.073.892.295
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah dokumen Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	75.400.000	1 Dokumen	158.310.000	1 Dokumen	458.310.000	1 Dokumen	480.000.000	1 Dokumen	375.000.000	1 Dokumen	400.000.000	5 Dokumen	1.871.620.000
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	1 Dokumen	75.400.000	1 Dokumen	158.310.000	1 Dokumen	458.310.000	1 Dokumen	480.000.000	1 Dokumen	375.000.000	1 Dokumen	400.000.000	5 Dokumen	1.871.620.000
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	-	2 Unit Usaha	100.000.000	3 Unit Usaha	100.000.000	3 Unit Usaha	250.000.000	4 Unit Usaha	300.000.000	5 Unit Usaha	350.000.000	5 Unit Usaha	1.100.000.000
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standart Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	2 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	2 Unit Usaha	100.000.000	3 Unit Usaha	100.000.000	3 Unit Usaha	250.000.000	4 Unit Usaha	300.000.000	5 Unit Usaha	350.000.000	5 Unit Usaha	1.100.000.000
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	420.000.000	1 Dokumen	657.272.295	1 Dokumen	850.000.000	1 Dokumen	1.025.000.000	1 Dokumen	1.150.000.000	5 Dokumen	4.102.272.295
		Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	0 Ton	0	1 Ton	320.000.000	1 Ton	457.272.295	1,5 Ton	550.000.000	1,75 Ton	575.000.000	2 Ton	650.000.000	2 Ton	2.552.272.295
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0	2 Pelaku Usaha	100.000.000	2 Pelaku Usaha	200.000.000	2 Pelaku Usaha	300.000.000	2 Pelaku Usaha	450.000.000	2 Pelaku Usaha	500.000.000	10 Pelaku Usaha	1.550.000.000
						3.179.058.432		13.449.228.219		13.758.582.295		15.830.400.000		17.110.000.000		18.250.000.000		75.418.210.514

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja pelayanan bidang urusan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan Dinas Perikanan Kota Dumai dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai terpilih. Penetapan indikator berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Penetapan indikator kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai dikenal dengan indikator kinerja utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan. Indikator Kinerja Utama sebaiknya ditetapkan indikator kinerja yang jelas, spesifik dan terukur (*measurable*). IKU sebaiknya dinyatakan secara eksplisit dan rinci, sehingga menjadi jelas apa yang diukur.

Pada perubahan rencana strategis, satuan indikator sasaran diubah menjadi dalam bentuk persentase. Hal ini menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada bagian lampiran bidang urusan kelautan dan perikanan. Pada lampiran tersebut dijelaskan bahwa satuan produksi perikanan, cakupan bina kelompok adalah dalam bentuk persentase. Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut.

Tabel 21. Rumus perhitungan Indikator Kinerja

No	Uraian	Rumus
1.	Produksi Perikanan Tangkap	$\frac{\text{Jumlah produksi perikanan tangkap}}{\text{Target produksi perikanan tangkap}} \times 100\%$
2.	Produksi Perikanan Budidaya	$\frac{\text{Jumlah produksi perikanan budidaya}}{\text{Target produksi perikanan budidaya}} \times 100\%$

No	Uraian	Rumus
3.	Cakupan bina kelompok nelayan	$\frac{\text{Jumlah kelompok nelayan yang dibina}}{\text{Jumlah kelompok nelayan}} \times 100\%$
4.	Cakupan bina kelompok budidaya	$\frac{\text{Jumlah kelompok budidaya yang dibina}}{\text{Jumlah kelompok budidaya}} \times 100\%$

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Untuk indikator angka konsumsi ikan, satuan yang digunakan masih sama, yaitu kg/kapita/tahun. Angka konsumsi ikan merupakan jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat Kota Dumai selama satu tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar. Rumus perhitungan angka konsumsi ikan adalah

$$AKI = A+B+C$$

Dimana: A = Konsumsi di rumah tangga

B = Konsumsi di luar rumah tangga

C = Konsumsi tidak tercatat

Penjelasan:

- 1) Konsumsi di rumah tangga. Konsumsi di rumah tangga dihitung berdasarkan data susenas (BPS) yang dikonversi dalam bentuk setara utuh segar. Ada 4 (empat) komponen jenis ikan yang dihitung yaitu (1) ikan dan udang segar, (2) ikan dan udang asin/diawetkan, (3) terasi/petis (di dalam kelompok bumbu-bumbuan), dan (4) ikan dalam kelompok makanan jadi (ikan bakar, presto, pindang, dll). Data keempat kelompok tersebut dari data Susenas, tidak dapat langsung dijumlahkan karena satuan berbeda (kg, ons, dan potong), dan masih diperlukan faktor konversi dari ikan dalam bentuk asin/awetan dan bumbu-bumbuan ke ikan dalam bentuk segar. Selain itu, diperlukan juga konversi untuk ikan yang berasal dari “kelompok makanan/minuman jadi” dari satuan potong ke satuan kilogram.
- 2) Konsumsi luar rumah tangga. Konsumsi ini memperhitungkan (1) perkembangan hotel, restoran dan katering (2) perkembangan tamu hotel dan restoran; (3) perkembangan penyediaan menu ikan oleh katering; (4) Potensi kebutuhan ikan di Rumah Tangga Khusus (kelompok ini tidak masuk dalam pencacahan Susenas). Rumah

Tangga Khusus yaitu: (1) orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga; dan (2) kelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.

- 3) Konsumsi tidak tercatat. Menggali beberapa produk olahan ikan yang berpotensi tidak tercatat karena tidak ada di dalam Susenas, terutama produk olahan ikan berbahan baku surimi, seperti nugget ikan, bakso ikan, pempek, siomay, otak-otak, dan lain sebagainya.

Pada perubahan rencana strategis tahun 2021-2026, target tahun 2021 dan 2022 tidak dapat diubah karena sudah ada laporan kinerja instansi pemerintah. Namun, penyesuaian/perubahan target indikator sasaran bisa diubah dari tahun 2023 s/d 2026. Penyesuaian target ini disesuaikan dengan data 5 (lima) tahunan capaian indikator kinerja Tahun 2017-2022. Berdasarkan data tersebut, maka diperoleh target tahunan yang akan dicapai Dinas Perikanan Kota Dumai berdasarkan Tabel 22. Berdasarkan Tabel 22, rata-rata pertumbuhan produksi perikanan tangkap sebesar 12.62% dan produksi perikanan budidaya sebesar 2.25%. Rata-rata pertumbuhan tersebut dilihat dari capaian produksi, baik perikanan tangkap dan budidaya pada Tahun 2017-2022. Untuk angka konsumsi ikan (AKI), rata-rata pertumbuhannya adalah sebesar 4.15%.

Target capaian yang terdapat pada Tabel 22 menjadi dasar untuk indikator kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 22. Target Capaian Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Realisasi						Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Produksi Perikanan Budidaya	ton	342.36	213.87	329.78	293.79	317.23	382.69	308	330	353	378	378
2	Produksi Perikanan Tangkap	ton	563.05	564.77	650.88	706.35	710.57	1,020.30	1,050	1,118	1,186	1,254	1,254
3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	kelompok	26	28	29	29	32	18	20	22	24	26	26
4	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	kelompok	25	38	31	34	37	31	34	37	40	43	43
5	Angka Konsumsi Ikan	kg/kap/tahun	40.51	40.16	45.19	44.75	45.19	49.64	50.1	50.6	51.1	51.6	51.6

Tabel 23. T-C. 28 Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Produksi Perikanan Budidaya	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Produksi Perikanan Tangkap	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	69.23	69.23	76.92	84.62	92.31	100	100
4	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	%	70	70	77.5	85	92.5	100	100
5	Angka Konsumsi Ikan	kg/ kap/ tahun	49.64	49.64	50.1	50.6	51.1	51.6	51.6

BAB VIII PENUTUP

Rencana strategis Dinas Perikanan Kota Dumai periode 2021-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana strategis ini ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sumber pendanaan, dan komitmen seluruh pimpinan dan staf Dinas Perikanan Kota Dumai. Rencana strategis ini disusun sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana strategis Kota Dumai Tahun 2021-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan Kota Dumai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Selain itu, rencana strategis Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi pedoman dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kota Dumai. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan strategis ini diucapkan terima kasih, sehingga tujuan Dinas Perikanan Kota Dumai dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai terpilih dapat terwujud.

L
A
M
P
I
R
A
N

Tujuan	Sasaran	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN												TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Rp.
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan budidaya		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Produksi perikanan tangkap		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan bina kelompok budidaya		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan bina kelompok Nelayan		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Angka konsumsi ikan	42 Kg/kapita/tahun		42 Kg/kapita/tahun		50.1 Kg/kapita/tahun		50.6 Kg/kapita/tahun		51.1 Kg/kapita/tahun		51.6 Kg/kapita/tahun		51.6 Kg/kapita/tahun		51.6 Kg/kapita/tahun	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	0%	100%	2.473.927.032	100%	7.699.918.219	100%	7.100.000.000	100%	7.850.000.000	100%	8.150.000.000	100%	8.400.000.000	100%	38.554.918.219	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	59.914.113	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	80.200.000	13 Dokumen	92.000.000	13 Dokumen	133.000.000	13 Dokumen	140.000.000	41 Dokumen	545.200.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	3 Dokumen	2.000.000	3 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	5.000.000	9 Dokumen	12.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	12.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	12.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	12.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD		Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	12.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	4 Laporan	59.914.113	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	80.200.000	4 Laporan	80.000.000	4 Laporan	103.000.000	4 Laporan	110.000.000	20 Laporan	473.200.000	
Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	3 Laporan	12.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen / Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	19.970.000	1 Dokumen	3.728.499.379	1 Dokumen	3.498.000.000	4 Dokumen	3.356.000.000	4 Dokumen	3.509.000.000	4 Dokumen	3.749.000.000	5 Dokumen	17.840.499.379	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan	0 Orang/ Bulan	0	25 Orang/ Bulan	3.728.499.379	25 Orang/ Bulan	3.498.000.000	25 Orang/ Bulan	3.350.000.000	25 Orang/ Bulan	3.500.000.000	25 Orang/ Bulan	3.740.000.000	25 Orang/ Bulan	17.816.499.379	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	2 Laporan	19.970.000	0 Laporan	-	0 Laporan	-	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	3.000.000	2 Laporan	3.000.000	6 Laporan	8.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	-	0 Laporan	-	7 Laporan	2.000.000	7 Laporan	3.000.000	7 Laporan	3.000.000	21 Laporan	8.000.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	3 Dokumen	8.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	75.000.000	6 Dokumen	86.000.000	6 Dokumen	110.000.000	6 Dokumen	101.000.000	10 Dokumen	447.000.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	90.000.000	2 Dokumen	90.000.000	10 Dokumen	405.000.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	2.000.000	3 Dokumen	9.000.000	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	2.000.000	3 Laporan	9.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	-	0 Laporan	-	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000	6 Laporan	15.000.000	
Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	-	0 Laporan	-	2 laporan	2.000.000	2 laporan	5.000.000	2 laporan	2.000.000	6 Laporan	9.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit	0 Unit	-	28 Unit	1.376.000.000	27 Unit	918.450.000	32 Unit	1.085.000.000	15 Unit	1.535.000.000	20 Unit	847.000.000	126 Unit	5.761.450.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	460.000.000	1 Unit	130.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	180.000.000	1 Unit	190.000.000	5 Unit	1.110.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	575.000.000	5 Unit	155.000.000	3 Unit	460.000.000	1 Unit	450.000.000	5 Unit	237.000.000	15 Unit	1.877.000.000	
Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	20 Unit	85.000.000	15 Unit	85.000.000	16 Unit	150.000.000	8 Unit	165.000.000	8 Unit	100.000.000	67 Unit	585.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	5 Unit	56.000.000	3 Unit	70.000.000	3 Unit	125.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	50.000.000	13 Unit	451.000.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	-	1 Unit	230.000.000	0 Unit	-	1 Unit	300.000.000	0 Unit	-	2 Unit	530.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	190.000.000	1 Unit	120.000.000	5 Unit	810.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	-	1 Unit	48.450.000	8 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000	4 Unit	150.000.000	15 Unit	398.450.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	185.000.000	1 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen	645.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	-	-	4 orang	110.000.000	6 orang	150.000.000	7 orang	185.000.000	8 orang	200.000.000	25 orang	645.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	1.363.067.261	6 Dokumen	450.623.200	6 Dokumen	544.100.000	7 Dokumen	590.000.000	7 Dokumen	725.000.000	7 Dokumen	815.000.000	33 dokumen	3.124.723.200	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	91.568.228	4 Paket	7.500.000	4 Paket	10.000.000	1 Paket	15.000.000	4 Paket	25.000.000	4 Paket	15.000.000	20 Paket	72.500.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	292.834.683	4 Paket	197.000.000	4 Paket	180.000.000	4 Paket	190.000.000	4 Paket	250.000.000	4 Paket	300.000.000	20 Paket	1.117.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	27.045.000	4 Paket	14.533.200	4 Paket	25.000.000	4 Paket	20.000.000	4 Paket	60.000.000	4 Paket	70.000.000	12 Paket	150.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	59.796.300	4 Paket	24.000.000	4 Paket	22.100.000	4 Paket	25.000.000	4 Paket	30.000.000	4 Paket	35.000.000	20 Paket	134.533.200	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	59.796.300	4 Paket	24.000.000	4 Paket	22.100.000	4 Paket	25.000.000	4 Paket	30.000.000	4 Paket	35.000.000	20 Paket	136.100.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	1 Dokumen	8.640.000	1 Dokumen	7.590.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	44.590.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	883.183.050	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	320.000.000	1 Laporan	350.000.000	5 Laporan	1.470.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	584.038.954	3 Laporan	1.322.000.000	3 Laporan	1.379.250.000	4 Laporan	1.133.000.000	4 Laporan	1.303.000.000	4 Laporan	1.473.000.000	18 Laporan	6.610.250.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.640.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	5 Laporan	15.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	228.348.014	1 Laporan	289.000.000	1 Laporan	215.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	280.000.000	1 Laporan	330.000.000	5 Laporan	1.364.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	140.000.000	3 Laporan	360.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	353.050.940	1 Laporan	1.030.000.000	1 Laporan	1.161.250.000	1 Laporan	780.000.000	1 Laporan	900.000.000	1 Laporan	1.000.000.000	5 Laporan	4.871.250.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 Unit	11 Unit	416.936.704	18 Unit	647.795.640	21 Unit	495.000.000	34 Unit	1.358.000.000	34 Unit	650.000.000	34 Unit	1.075.000.000	63 Unit	4.225.795.640	

Tujuan	Sasaran	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN												TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Rp.
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	300.900.704	9 Unit	198.000.000	9 Unit	180.000.000	13 Unit	180.000.000	13 Unit	200.000.000	13 Unit	250.000.000	13 Unit	1.008.000.000
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	10 Unit	183.000.000	10 Unit	110.000.000	8 Unit	95.000.000	28 unit	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0	8 Unit	67.000.000	8 Unit	35.000.000	8 Unit	80.000.000	10 Unit	90.000.000	10 Unit	120.000.000	10 Unit	392.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000	1 Unit	382.795.640	4 Unit	280.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	230.000.000	8 Unit	1.642.795.640
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	16.036.000	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	215.000.000	0 Unit	-	1 Unit	200.000.000	2 Unit	415.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	200.000.000	0 Unit	-	1 Unit	180.000.000	2 Unit	380.000.000
		PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan kelompok nelayan terbina	18 kelompok	18 kelompok	400.000.000	69,23%	1.525.000.000	76,92%	1.725.000.000	84,61%	2.070.000.000	92,31%	2.400.000.000	100%	2.700.000.000	100%	8.085.000.000
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Perairan sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah perairan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya	Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	295.000.000	3 Dokumen	340.000.000	3 Dokumen	370.000.000	11 Dokumen	1.185.000.000
		Penyediaan Data dan Informasi sumber daya ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	Dokumen	0	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	180.000.000	5 Dokumen	720.000.000
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	-	1 Unit	50.000.000	1 Unit	80.000.000	1 Unit	90.000.000	3 Unit	220.000.000
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	Unit	0	0 Unit	0	0 unit	-	1 unit	65.000.000	1 unit	80.000.000	1 unit	100.000.000	3 Unit	245.000.000
		Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok nelayan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya	18 kelompok	18 kelompok	400.000.000	18 kelompok	1.250.000.000	20 kelompok	1.150.000.000	22 kelompok	1.360.000.000	24 kelompok	1.635.000.000	26 kelompok	1.900.000.000	26 kelompok	4.960.000.000
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang	0 Orang	-	60 Orang	450.000.000	100 Orang	300.000.000	100 Orang	300.000.000	100 Orang	300.000.000	100 Orang	300.000.000	460 Orang	1.650.000.000
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	18 Kelompok	18 Kelompok	400.000.000	18 Kelompok	50.000.000	20 Kelompok	450.000.000	22 Kelompok	460.000.000	24 Kelompok	400.000.000	26 Kelompok	500.000.000	26 Kelompok	1.860.000.000
		Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	0 Unit Usaha	0 Kelompok	0	7 Unit Usaha	750.000.000	5 Unit Usaha	400.000.000	1 Unit Usaha	100.000.000	1 Unit Usaha	100.000.000	1 Unit Usaha	100.000.000	15 Unit Usaha	1.450.000.000
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	-	0 Unit	0	10 Unit	500.000.000	10 Unit	835.000.000	10 Unit	1.000.000.000	30 Unit	2.335.000.000
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah dokumen/laporan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	2 Dokumen	160.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	300.000.000	10 Dokumen	1.360.000.000
		Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	5 Dokumen	860.000.000
		Pelayanan Penyelenggaraan tempat pelelangan ikan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0 Layanan	0 Layanan	0	1 Layanan	100.000.000	1 Layanan	100.000.000	1 Layanan	100.000.000	1 Layanan	100.000.000	1 Layanan	100.000.000	5 Layanan	500.000.000
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembuatan tanda daftar kapal perikanan nelayan kecil ukuran kapal sampai dengan 5 GT sesuai dengan kewenangan daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	-	2 Dokumen	85.000.000	2 Dokumen	125.000.000	2 Dokumen	115.000.000	2 Dokumen	125.000.000	2 Dokumen	130.000.000	10 Dokumen	580.000.000
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	65.000.000	5 Dokumen	285.000.000
		Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Rekomendasi	0 Rekomendasi	0	10 Rekomendasi	50.000.000	30 Rekomendasi	50.000.000	30 Rekomendasi	65.000.000	30 Rekomendasi	65.000.000	30 Rekomendasi	65.000.000	130 Rekomendasi	295.000.000
		PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	26 kelompok	26 kelompok	229.731.400	70%	3.446.000.000	77,50%	3.568.000.000	85%	4.150.400.000	92,50%	4.650.000.000	100%	5.000.000.000	100%	20.814.400.000
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Untuk Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Rekomendasi	Rekomendasi	0	Rekomendasi	0	25 Rekomendasi	32.000.000	25 Rekomendasi	20.000.000	25 Rekomendasi	40.000.000	25 Rekomendasi	50.000.000	25 Rekomendasi	142.000.000
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Rekomendasi	Rekomendasi	0	Rekomendasi	0	25 Rekomendasi	32.000.000	25 Rekomendasi	20.000.000	25 Rekomendasi	40.000.000	25 Rekomendasi	50.000.000	100 Rekomendasi	142.000.000
		Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Rekomendasi	Rekomendasi	0	Rekomendasi	0	Rekomendasi	0	Rekomendasi	0	Rekomendasi	0	Rekomendasi	0	Rekomendasi	0
		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya	25 Kelompok	0 Kelompok	-	31 Kelompok	1.180.000.000	34 Kelompok	1.102.000.000	37 kelompok	1.315.000.000	40 Kelompok	1.535.000.000	43 Kelompok	1.620.000.000	43 Kelompok	6.752.000.000
		Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	25 Kelompok	0 Kelompok	0	7 Kelompok	420.000.000	8 Kelompok	897.000.000	8 Kelompok	1.005.000.000	8 Kelompok	1.180.000.000	9 Kelompok	1.225.000.000	40 Kelompok	4.727.000.000
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	25 Kelompok	0 Kelompok	0	25 Kelompok	50.000.000	25 Kelompok	50.000.000	30 Kelompok	80.000.000	35 Kelompok	85.000.000	40 Kelompok	95.000.000	40 Kelompok	360.000.000
		Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	25 Kelompok	0 Kelompok	0	25 Kelompok	510.000.000	25 Kelompok	5.000.000	30 Kelompok	30.000.000	35 Kelompok	40.000.000	40 Kelompok	50.000.000	40 Kelompok	635.000.000
		Memberikan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	25 Kelompok	0 Kelompok	0	25 Kelompok	200.000.000	25 Kelompok	150.000.000	30 Kelompok	200.000.000	35 Kelompok	230.000.000	40 Kelompok	250.000.000	40 Kelompok	1.030.000.000
		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	25 Rekomendasi	0 Rekomendasi	-	25 Rekomendasi	100.000.000	0 Rekomendasi	0	25 Rekomendasi	25.000.000	25 Rekomendasi	40.000.000	25 Rekomendasi	55.000.000	125 Rekomendasi	220.000.000
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	25 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0	25 Rekomendasi	100.000.000	0 Rekomendasi	0	25 Rekomendasi	25.000.000	25 Rekomendasi	40.000.000	25 Rekomendasi	55.000.000	125 Rekomendasi	220.000.000
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Dokumen/laporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	2 Dokumen	229.731.400	6 Dokumen	2.166.000.000	7 Dokumen	2.434.000.000	7 Dokumen	2.790.400.000	7 Dokumen	3.035.000.000	7 Dokumen	3.275.000.000	5 Dokumen	13.700.400.000
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	120.000.000	5 Dokumen	460.000.000
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Unit	1 Unit	159.731.400	1 Unit	800.000.000	1 Unit	452.000.000	2 Unit	800.000.000	2 Unit	850.000.000	2 Unit	900.000.000	8 Unit	3.802.000.000
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Unit	0 Unit	0	1 Unit	400.000.000	1 Unit	541.000.000	1 Unit	360.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	450.000.000	5 Unit	2.151.000.000

Tujuan	Sasaran	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN												TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Rp.
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	96.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	380.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	450.000.000	5 Dokumen	1.626.000.000
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	250 Orang	0 Orang	0	250 Orang	170.000.000	250 Orang	240.000.000	250 Orang	350.000.000	250 Orang	400.000.000	250 Orang	450.000.000	1.250 Orang	1.610.000.000
		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	1050 Ha	0 Ha	0	1050 Ha	600.000.000	1050 Ha	800.900.000	1050 Ha	750.000.000	1050 Ha	800.000.000	1050 Ha	810.000.000	1050 Ha	3.760.900.000
		Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	20 Orang	50.100.000	20 Orang	60.400.000	20 Orang	85.000.000	20 Orang	95.000.000	80 Orang	290.500.000
		PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase rekomendasi yang dikeluarkan	100%	100%	-	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	180.000.000	100%	210.000.000	100%	250.000.000	100%	890.000.000
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	250.000.000	5 Dokumen	890.000.000
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	0 Bulan	0	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	250.000.000	5 Dokumen	890.000.000
		PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase wilayah sampel aki	100%	100%	75.400.000	100%	678.310.000	100%	1.215.582.295	100%	1.580.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.900.000.000	100%	7.073.892.295
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah dokumen Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	75.400.000	1 Dokumen	158.310.000	1 Dokumen	458.310.000	1 Dokumen	480.000.000	1 Dokumen	375.000.000	1 Dokumen	400.000.000	5 Dokumen	1.871.620.000
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	1 Dokumen	75.400.000	1 Dokumen	158.310.000	1 Dokumen	458.310.000	1 Dokumen	480.000.000	1 Dokumen	375.000.000	1 Dokumen	400.000.000	5 Dokumen	1.871.620.000
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	-	2 Unit Usaha	100.000.000	3 Unit Usaha	100.000.000	3 Unit Usaha	250.000.000	4 Unit Usaha	300.000.000	5 Unit Usaha	350.000.000	5 Unit Usaha	1.100.000.000
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standart Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	2 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	2 Unit Usaha	100.000.000	3 Unit Usaha	100.000.000	3 Unit Usaha	250.000.000	4 Unit Usaha	300.000.000	5 Unit Usaha	350.000.000	5 Unit Usaha	1.100.000.000
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	420.000.000	1 Dokumen	657.272.295	1 Dokumen	850.000.000	1 Dokumen	1.025.000.000	1 Dokumen	1.150.000.000	5 Dokumen	4.102.272.295
		Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	0 Ton	0	1 Ton	320.000.000	1 Ton	457.272.295	1,5 Ton	550.000.000	1,75 Ton	575.000.000	2 Ton	650.000.000	2 Ton	2.552.272.295
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0	2 Pelaku Usaha	100.000.000	2 Pelaku Usaha	200.000.000	2 Pelaku Usaha	300.000.000	2 Pelaku Usaha	450.000.000	2 Pelaku Usaha	500.000.000	10 Pelaku Usaha	1.550.000.000
		Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah dokumen Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	5 Dokumen	-
		Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	kg/kapita/tahun			42 Kg/kapita/tahun	-	50.1 Kg/kapita/tahun	-	50.6 Kg/kapita/tahun	-	51.1 Kg/kapita/tahun	-	51.6 Kg/kapita/tahun	-	51.6 Kg/kapita/tahun	
		Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan	Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan yang difasilitasi	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	3 Unit	-
		Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	3 Unit	-
						3.179.058.432		13.449.228.219		13.758.582.295		15.830.400.000		17.110.000.000		18.250.000.000		75.418.210.514